

COVER DALAM



BANK

**DAN INDUSTRI KEUANGAN
NON BANK (IKNB) SYARIAH**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Herlan Firmansyah, S.Pd., M.Pd., dan
H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

BANK

DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) SYARIAH



Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

©Herlan Firmansyah, S.Pd., M.Pd., dan H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, September 2014

Koreksi Typos : Muhammad Syafi'i

Tata Letak : Rizal Zakaria

Desain Sampul : Ujang Prayana

Pra-cetak : Zuprianto

Ukuran : 14,8 x 21 cm

Halaman : xvi+256

ISBN : 978-602-1379-13-4

Diterbitkan oleh :

Lecture Books

PT NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF

Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013

Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1

Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 13630

Telepon: +62-21-36501501

E-Mail: penerbit@nagamedia.co.id

Website: www.nagamedia.co.id

Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana,

BANK DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) SYARIAH/Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana

-Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014.

272 hlm.; 21 cm

Bibliografi: hlm. 229.

ISBN: 978-602-1379-13-4

1. Ekonomi

I. Judul



Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pemilik segala ilmu pengetahuan dan Pencerah kepada setiap ummat yang memiliki tekad untuk berbagi ilmu melalui tulisan. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis akhirnya dapat menyajikan buku ini sampai di hadapan pembaca semua.

Lahirnya buku ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji dan mengenalkan tata kelola baru terkait dengan kelembagaan Bank Indonesia dan Industri keuangan di Indonesia. Dewasa ini telah terjadi perubahan tata kelola pengaturan dan pengawasan perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia, hal tersebut terjadi sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdirinya OJK merupakan tindak lanjut dari amanah UU Nomor 23 Tahun 1999 jo UU Nomor 3 tahun 2004 jo UU Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI) pasal 34, yang menegaskan

bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Dalam buku ini dikembangkan materi-materi yang berhubungan dengan kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Keseluruhan isi Bab terdiri atas sebelas Bab. Bab 1 menyajikan tentang muqaddimah, Bab 2 menyajikan materi tentang Bank Sentral, Bab 3 menyajikan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab 4 menyajikan materi tentang Perbankan Syariah, Bab 5 menyajikan materi tentang Pasar Modal, Bab 6 menyajikan materi tentang asuransi syariah, Bab 7 menyajikan materi tentang pegadaian syariah, Bab 8 menyajikan materi tentang leasing syariah, Bab 9 menyajikan materi tentang pegadaian syariah, Bab 10 menyajikan materi tentang perusahaan anjak piutang syariah, Bab 11 menyajikan materi tentang perusahaan modal ventura syariah.

Buku ini cocok untuk menjadi pegangan para dosen dan mahasiswa program studi ekonomi dan perbankan. Namun demikian, buku ini bukanlah referensi final, melainkan stimulus dan bahan kajian awal untuk melakukan kajian lanjutan demi memperdalam topik-topik yang terkait dengan bank sentral, OJK, perbankan syariah, pasar modal dan IKNB.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusinya selama penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat bagi para pembaca semua. Penulis sangat terbuka dengan masukan-

masukan dari para Pembaca demi penyusunan edisi selanjutnya dan karya-karya buku lainnya. Segala masukan dapat dikirim melalui email: islamania_erlan@yahoo.co.id

Cianjur, Juli 2014

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
 Bab 1	
Muqaddimah	1
 Bab 2	
Bank Sentral	3
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	3
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	3
A. Pengertian	4
B. Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Sentral	6
C. Tujuan, Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia	9
D. Kebijakan Moneter	12
E. Kebijakan Sistem Pembayaran	20
F. Stabilitas Sistem Keuangan	30
G. Organisasi dan Manajemen Bank Indonesia	31
Rangkuman (<i>Summary</i>)	36
Refleksi (<i>Reflection</i>)	37

Bab 3

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	39
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	39
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	39
A. Pengertian	40
B. Status dan Kedudukan OJK	41
C. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	43
D. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Perbankan	45
E. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Pasar Modal	47
F. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap IKNB	47
Rangkuman (<i>Summary</i>)	49
Refleksi (<i>Reflection</i>)	50

Bab 4

Perbankan Syariah	51
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	51
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	51
A. Pengertian	52
B. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	52
C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	54
D. Jenis-Jenis Bank Syariah	55
E. Produk dan Layanan Bank Syariah	56
Rangkuman (<i>Summary</i>)	76
Refleksi (<i>Reflection</i>)	77

Bab 5

Pasar Modal	79
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	79
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	79
A. Pengertian	80
B. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia	81
C. Fungsi Pasar Modal	85
D. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder	87
E. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	93
F. Instrumen Pasar Modal Syariah	109
Rangkuman (<i>Summary</i>)	128
Refleksi (<i>Reflection</i>)	129

Bab 6

Asuransi Syariah	131
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	131
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	131
A. Pengertian	132
B. Sejarah Asuransi Syari'ah di Indonesia	133
C. Landasan Hukum Asuransi Syariah	135
D. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	138
E. Jenis-Jenis Usaha Asuransi	141
F. Instrumen Usaha Asuransi Syariah	143
Rangkuman (<i>Summary</i>)	144
Refleksi (<i>Reflection</i>)	146

Bab 7

Dana Pensiun Syariah	147
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	147
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	147
A. Pengertian	148
B. Sejarah Dana Pensiun	149
C. Landasan Hukum Dana Pensiun	150
D. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun	151
E. Jenis – Jenis Dana Pensiun	153
F. Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	155
Rangkuman (<i>Summary</i>)	157
Refleksi (<i>Reflection</i>)	158

Bab 8

Leasing Syariah	159
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	159
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	159
A. Pengertian	160
B. Sejarah Leasing Syariah	161
C. Landasan Hukum Leasing Syariah	162
D. Jenis Usaha <i>Leasing</i> Syari'ah	164
E. Prinsip Operasional dan Prosedur Transaksi <i>Leasing</i> Syariah	167
Rangkuman (<i>Summary</i>)	169
Refleksi (<i>Reflection</i>)	169

Bab 9

Pegadaian Syariah	171
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	171
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	171
A. Pengertian	172
B. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia	173
C. Landasan Hukum Pegadaian Syariah	174
D. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah	176
E. Mekanisme Produk Gadai Syariah	177
Rangkuman (<i>Summary</i>)	181
Refleksi (<i>Reflection</i>)	182

Bab 10

Anjak Piutang (Factoring) Syariah	183
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	183
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	183
A. Pengertian	184
B. Sejarah Anjak Piutang Syariah	187
C. Landasan Hukum Anjak Piutang Syariah	192
D. Instrumen / Produk Usaha Anjak Piutang	194
E. Prinsip dan Prosedur Operasional Usaha Anjak Piutang Syariah	199
Rangkuman (<i>Summary</i>)	203
Refleksi (<i>Reflection</i>)	204

Bab 11

Perusahaan Modal Ventura Syariah	205
Peta Konsep (<i>Concept Maps</i>)	205
Kata Kunci (<i>Key Words</i>)	205
A. Pengertian	206
B. Sejarah Modal Ventura Syari'ah	207
C. Landasan Hukum Modal Ventura	210
D. Karakteristik dan Tujuan Modal Ventura Syariah	212
E. Sumber Dana Modal Ventura	216
F. Jenis Pembiayaan Modal Ventura Syari'ah	219
G. Pola Pembiayaan Modal Ventura	223
Rangkuman (<i>Summary</i>)	226
Refleksi (<i>Reflection</i>)	227
 Daftar Pustaka	 229
Glosarium (Glosary)	241
Tentang Penulis	249
 Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1 (UU No.6 Tahun 2009)	
Lampiran 2 (UU No.21 Tahun 2011)	
Lampiran 3 (UU No.21 Tahun 2008)	

Bab 1

Muqaddimah

Dewasa ini telah terjadi perubahan tata kelola pengaturan dan pengawasan perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia, hal tersebut terjadi sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdirinya OJK merupakan tindak lanjut dari amanah UU Nomor 23 Tahun 1999 jo UU Nomor 3 tahun 2004 jo UU Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI) pasal 34, yang menegaskan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Dalam praktiknya, tepat per 31 Desember 2013 atau efektif 1 Januari 2014, pengaturan dan pengawasan Perbankan beralih dari BI kepada OJK.

Demikian halnya dengan pasar modal, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 menegaskan bahwa pasar modal diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Namun, sejak berdirinya

OJK, tepatnya sejak 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB beralih dari BAPEPAM-LK kepada OJK. Adapun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pengaturan dan pengawasannya akan berada di bawah OJK pada tahun 2015.

Berdirinya OJK menjadikan peran dan fungsi BI, khususnya terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential beralih ke OJK. BI fokus kepada kebijakan moneter, sistem pembayaran dan macroprudential. Kebijakan makroprudential secara umum adalah kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara BAPEPAM-LK ditiadakan dan sepenuhnya bermigrasi kepada peran dan fungsi OJK sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi industri pasar modal dan lembaga keuangan.

Buku ini menguraikan tentang kelembagaan BI dalam konteks tata kelola perbankan dewasa ini, peran dan fungsi OJK, perbankan khususnya perbankan syariah dan industri keuangan non bank syariah yang meliputi pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, dana pensiun, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura syariah. Secara umum gambaran isi buku ini meliputi: Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan Syariah, Pasar Modal, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Leasing Syariah, Dana Pensiun, Perusahaan Anjak Piutang, dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Bab 2

Bank Sentral

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*):

Bank Sentral, Bank Indonesia, Kebijakan Moneter, Sistem Pembayaran.

A. Pengertian

Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah bank sentral? Apakah sama dengan bank pada umumnya, masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang di bank sentral? Jika terdapat pemahaman bahwa bank sentral termasuk salah satu jenis bank yang dapat menerima simpanan dan pinjaman, itulah pandangan yang sangat keliru. Bagaimana sesungguhnya bank sentral itu?

Salah satu definisi bank sentral dikemukakan oleh John Singleton (2011) bahwa bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana (*rekening*) dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir (*settlement*) dari transaksi antar bank. Dilihat dari sisi kelembagaannya, Kisch and Elkin (1932) menyimpulkan bahwa bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi.

Pada periode awal perkembangannya, bank sentral lebih berfungsi sebagai bankirnya sistem perbankan. Dalam hal ini, bank sentral memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dana jangka pendeknya. Selain itu, bank-bank sentral pada periode awal juga melakukan aktivitas komersial layaknya bank umum biasa.

Bank sentral dewasa ini dirancang sebagai lembaga kebijakan publik yang tujuan utamanya adalah mempertahankan stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bank sentral juga menyediakan komponen inti dalam sistem pembayaran, yaitu uang kartal untuk masyarakat dan penyelesaian transfer antar bank melalui rekening bank di bank sentral. Bank sentral juga

kerap berfungsi sebagai pengelola cadangan devisa negara.

Dalam hal kerja sama dengan otoritas lainnya, bank sentral juga melakukan peranan penting dalam pengawasan dan pengembangan sistem keuangan di negaranya. Bank sentral juga tidak melakukan lagi aktivitas-aktivitas komersial yang dapat mengurangi perannya sebagai lembaga kebijakan publik.

Secara historis, bank sentral tertua di dunia ialah Sveriges Riskbank (Swedia) dan Bank of England (Inggris) yang memulai sejarahnya di abad ketujuh belas. Ketika pertama kali didirikan, Sveriges Riskbank masih jauh dari gambaran bank sentral yang ada pada saat ini. Perjalanan sejarah bank sentral mengalami perubahan yang signifikan pada abad kedelapan belas, sembilan belas, dan dua puluh.

Di Indonesia, bank sentral dimulai sejak pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda 24 Januari 1828. De Javasche Bank bertugas antara lain menerbitkan uang kertas (*banknotes*), memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan, memperdagangkan logam mulia, bertindak sebagai kasir pemerintah. Setelah kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah pemerintah. Di periode awal ini, Bank Indonesia juga masih diberi tugas untuk menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.

Di awal perkembangannya, Bank Indonesia juga memiliki usaha-usaha komersial antara lain seperti memindahkan

uang (melalui surat atau pemberitahuan, dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya. Dalam perkembangannya, usaha-usaha komersial itu dihentikan. Terlebih setelah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan independensi dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi Bank.

B. Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Sentral

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pasal 4 bahwa Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sejak berdirinya, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia sudah mengalami berbagai perkembangan status dan kedudukan. Kini (sebelum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan), Bank Indonesia mempunyai peran dan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Peran dan tugas Bank Indonesia tersebut merupakan evolusi yang semula hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilakukan oleh De Javasche Bank, kemudian UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan tugas pokok menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang,

dan mengembangkan sistem pembayaran, serta berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan sebagai banker bank. Namun, tetap menjalankan beberapa fungsi bank komersial.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan tidak lagi berfungsi ganda sebagai bank komersial walaupun tetap berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan banknya bank. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memasuki era baru sebagai bank sentral independen, yang mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tugas Bank Indonesia meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.

Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan Kementerian karena Bank Indonesia berkedudukan di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah, dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam atau di luar pengadilan.

Dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perumusan kebijakan moneternya, serta membina hubungan kerja yang baik dengan pihak lainnya. Untuk menjaga akuntabilitasnya, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR berupa laporan tahunan, triwulanan, atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunannya kepada DPR. Atas dasar laporan dan informasi tersebut, DPR memberi penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia setiap tahun.

Badan Supervisi Bank Indonesia sebagai kepanjangan tangan DPR membantu DPR untuk melakukan telaah atas laporan keuangan tahunan, anggaran operasional, dan investasi Bank Indonesia serta atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.

C. Tujuan, Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu terdiri atas dua aspek yaitu, *pertama*, kestabilan terhadap barang dan jasa, *kedua*, kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, BI sebagaimana dijelaskan dalam UU BI Pasal 8 bahwa BI mempunyai tiga tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter;
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran;
3. Mengatur dan Mengawasi Bank.

Pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan /atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang, sekaligus mendorong perekonomian nasional. Dalam melaksanakan tugas kebijakan moneter, bank sentral senantiasa memantau perkembangan dan kecenderungan berbagai variabel ekonomi makro, moneter, dan keuangan. Bank sentral juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah agar terjadi kerjasama yang padu antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta kebijakan ekonomi makro

lainnya. Hasil analisis dan pemantauan digunakan oleh bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, baik melalui pengendalian jumlah uang beredar maupun suku bunga.

Kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran dapat berlangsung, baik secara tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai menyangkut pencetakan dan pengedaran uang agar jumlah, denominasi, kelayakan, ataupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Adapun sistem pembayaran non tunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antar bank, kartu kredit, ataupun Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran penting perbankan terutama terletak pada fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan alternatif pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter, hal tersebut dikarenakan sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan.

Aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, karena peredaran uang ataupun pelaksanaan sistem pembayaran nontunai pada umumnya melalui perbankan. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran,

dan pengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab bank sentral. Dengan pertimbangan tersebut, wajar apabila aktivitas perbankan pada umumnya diatur dan diawasi secara ketat oleh bank sentral. Bentuk pengaturan dan pengawasan perbankan mencakup perizinan, penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan baik, secara langsung di perbankan maupun secara tidak langsung melalui pemantaun laporan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung perekonomian nasional dapat tetap terjaga dan terpelihara.

Pelaksanaan ketiga tugas di atas saling terkait dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat karena sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter sebab pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 atau efektif tanggal 1 Januari 2014.

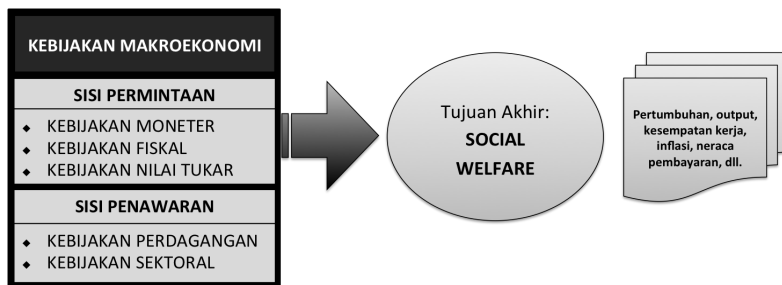
Sementara wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di atas adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi:
 - 1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi,
 - 2. melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing; dan
 - 3. menetapkan tingkat diskonto; menetapkan cadangan minimum; dan mengatur kredit atau pembiayaan.
- b. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:
 - 1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - 2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya; dan
 - 3. menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran .

D. Kebijakan Moneter

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas Bank Indonesia yang pertama adalah membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter dapat diartikan juga sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dari sisi permintaan selain kebijakan fiskal dan kebijakan nilai tukar. Kebijakan moneter disetiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Untuk melihat posisi kebijakan moneter dalam konteks kebijakan makro ekonomi Indonesia perhatikan bagan 2.1 sebagai berikut:



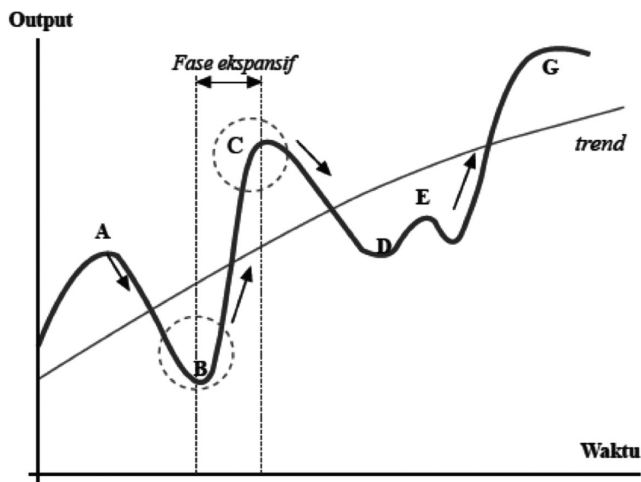
Sumber: Bank Indonesia

Bagan 2.1

Kebijakan Moneter sebagai Bagian dari Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi (*business cycle*). Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat (*boom*) tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada saat perekonomian sedang menurun (*depression* atau *slump*).

Secara umum dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.



Grafik 2.1

Siklus Kegiatan Ekonomi

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan kebijakan moneter menurut UU BI pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank

Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan himbauan moral. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

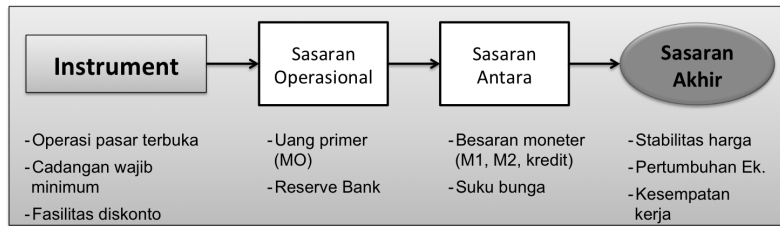
Bank Indonesia berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter, dalam pelaksanaannya Bank Indonesia mempunyai peran mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. Jika bank sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum dan masyarakat. Sebaliknya, jika bank sentral

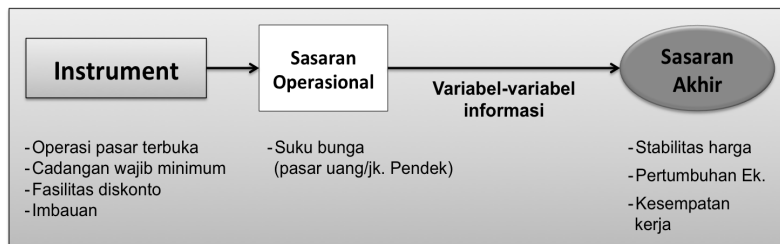
ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka bank sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat.

2. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka bank sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya/bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Pada gilirannya bank-bank umum dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dengan suku bunga yang rendah. Jika suku bunga kredit perbankan turun, maka permintaan masyarakat terhadap kredit perbankan akan naik, dan ini akan menyebabkan uang beredar bertambah.
3. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat cadangan minimalnya, dengan meningkatnya cadangan minimal ini, akan dapat mengurangi tabungan giral yang dapat diciptakan oleh bank-bank, dengan sendirinya akan menurunkan jumlah uang beredar dan sebaliknya.

Rangkaian langkah-langkah bank sentral dari penentuan dan prakiraan sasaran akhir, pemantauan variabel-variabel ekonomi-keuangan yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter, hingga pelaksanaan pengendalian moneter di pasar uang untuk mencapai sasaran akhir tersebut disebut **kerangka operasional kebijakan moneter** yang dapat digambarkan dalam bagan 2.2 sebagai berikut:



Kerangka Transmisi Operasional dengan Pendekatan Kuantitas



Kerangka Transmisi Operasional dengan Pendekatan Suku Bunga

Sumber: Bank Indonesia

Bagan 2.2.

Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Berdasarkan bagan 2.2 di atas dapat diketahui bahwa instrumen kebijakan moneter yang sering di jalankan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Giro Wajib Minimum

Giro wajib minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (*reserve*) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut

semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya (*reserve-nya*) untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya semakin besar persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman.

Memberikan cadangan wajib minimum ini bisa dijaga dalam bentuk kas atau dalam bentuk rekening giro di bank sentral. Biasanya cadangan dibedakan dalam dua bentuk yakni cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan wajib minimum lebih mengacu kepada cadangan primer. Sementara itu, cadangan sekunder merupakan tambahan, biasanya terdiri atas surat-surat berharga.

Persentase cadangan wajib minimum memengaruhi daya ekspansi kredit. Jika Bank Sentral menurunkannya, maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dan jumlah uang beredar berkurang.

2. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang, sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum, dan sebaliknya menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

3. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan dalam Operasi Pasar Terbuka oleh Bank Indonesia yaitu *BI rate*. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat umum.

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kepada setiap pemilik SBI, Bank Indonesia memberikan balas jasa berupa pendapatan bunga. Jika Bank Sentral bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank-bank, agar likuiditas (*reserve*) bank-bank berkurang,

sehingga kemampuan bank-bank memberikan pinjaman menurun. Tindakan ini disebut kontraksi moneter.

Sebaliknya, untuk menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bank-bank memberikan pinjaman, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Pembelian atau penjualan surat-surat berharga tersebut dapat pula dilakukan oleh Bank Indonesia dari/kepada masyarakat agar langsung dapat menambah/mengurangi jumlah uang beredar.

4. Moral Suasion

Bank sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro, informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan asset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan bank sentral.

E. Kebijakan Sistem Pembayaran

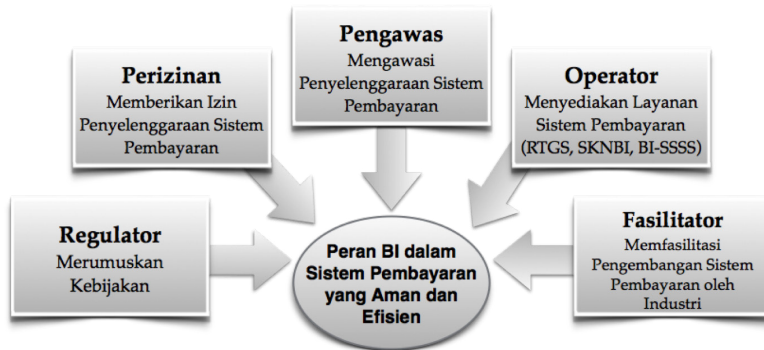
Tugas Bank Indonesia yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik lembaga dalam negeri maupun antar negara.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 Pasal 1 ayat 6 sebagaimana sudah disempurnakan dengan UU Nomor 3 tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter.

Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum sistem pembayaran dapat terbagi atas:

- a. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal/uang tunai yang meliputi Uang Kertas (UK) dan Uang Logam (UL).
- b. Alat pembayaran non-tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, antara lain, kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanahkan UU Nomor 23 tahun 1999 jo UU Nomor 3 tahun 2004 jo UU Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan 2.3 sebagai berikut:



Bagan 2.3

Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan bagan 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yakni sebagai berikut:

a. Regulasi

Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang transfer dana dan Surat Edaran (SE) No.15/23/DASP/27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan Transfer Dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia.

b. Perizinan

Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga

yang akan melakukan kegiatan Transfer Dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik.

c. Pengawasan

Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, melalui kegiatan monitoring (pemantauan) penilaian dan melakukan upaya yang mendorong pengusaha penyelenggaraan Sistem Pembayaran ke arah yang lebih baik.

d. Operator

Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mulai 31 Mei 2013 batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp.500.000.000 Adapun untuk BI-SSSS, BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga.

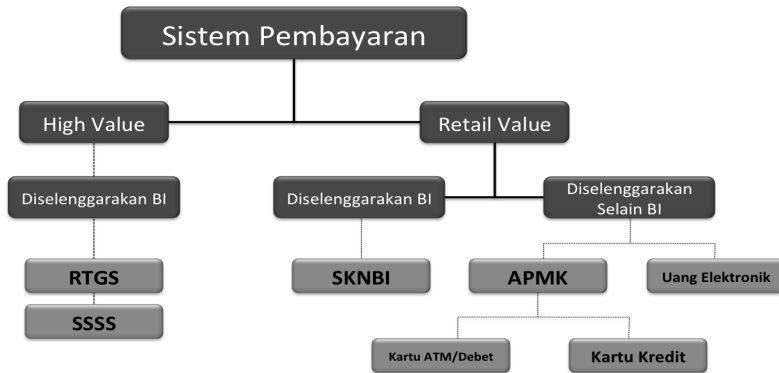
e. Fasilitator

Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Selain

melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam Bagan 2.3 di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran.

Selain melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam Bagan 2.3 di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran.

Khusus untuk penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni; *Pertama*, transaksi yang bernilai besar (*high value*) diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia *Real Times Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), *Kedua*, transaksi yang bernilai kecil (*ritel value*) diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan 2.4 sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia

Bagan 2.4

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia

Berdasarkan bagan 2.4 di atas dapat diketahui bahwa, penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri atas BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI. Untuk lebih jelasnya simak uraian sebagai berikut:

- a. **Bank Indonesia *Real Times Gross Settlement* (BI-RTGS).** Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien tergantung kepada kelancaran sistem pembayaran yang bernilai besar. Dengan lancarnya sistem pembayaran bernilai besar, kelancaran sistem pembayaran nasional akan terjaga. Sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah *Real Time Gross Settlement* (RTGS). BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya

dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem BI-RTGS pertama kali digunakan pada tanggal 17 November 2000. Sistem RTGS mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem BI-RTGS antara lain bertujuan:

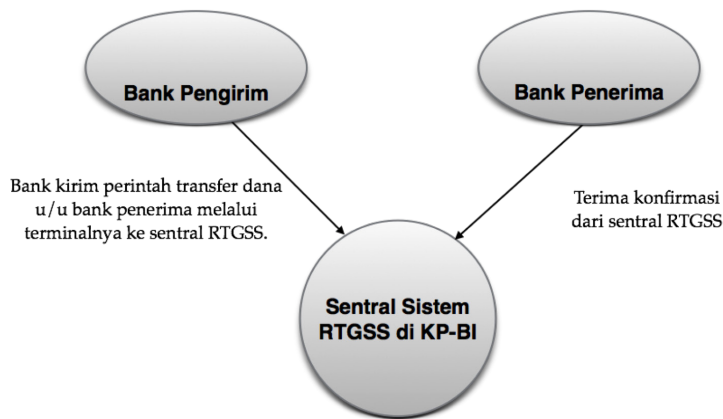
- 1) Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya.
- 2) Kepastian setelmen dapat diperoleh dengan segera.
- 3) Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.
- 5) Mengurangi risiko-risiko setelmen.

Tersedianya sistem BI-RTGS dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Dengan sistem setelmen yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dapat dihindari sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap bank lainnya.

Penyelenggara sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia. Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan peserta. Sedangkan peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta sistem BI-

RTGS dengan persetujuan Bank Indonesia, sepanjang keikutsertaan lembaga selain bank tersebut adalah untuk memperlancar sistem pembayaran nasional. Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BI-RTGS.

Secara sederhana, alur penyelenggaraan transaksi non tunai melalui BI-RTGS dapat dilihat dalam bagan 2.5 sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia

Bagan 2.5

Alur Transaksi dengan Menggunakan BI-RTGS

BI-RTGS dapat membantu untuk melakukan cek saldo kecukupan pengirim. Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rekening bank pengirim ke rekening bank penerima. Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses sampai dananya mencukupi.

b. Bank Indonesia–*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS)

Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia–*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). BI-SSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk pengadministrasian surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem BI-RTGS.

Pengadministrasian surat berharga meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal surat berharga. Transaksi BI-SSSS antara lain meliputi transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT), pemberian Fasilitas Pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank Umum dan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama pemerintah. Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS adalah:

1. Bank Indonesia.
2. Kementerian Keuangan.
3. Bank.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
6. Perusahaan Efek.
7. Pialang pasar modal.
8. Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

c. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran, sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Sistem kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi kliring yang dapat dilakukan meliputi:

1. Transfer debit (menggunakan cek, bilyet, giro atau warkat debit lainnya).
2. Transfer kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.

Untuk transfer kredit, batas nilai nominal yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI maksimal adalah Rp500.000.000. Adapun manfaat layanan SKNBI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah.
2. Mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif.

Adapun penyelenggara SKNBI dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.

2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

F. Stabilitas Sistem Keuangan

Sejak 31 Desember 2013 tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank memang dialihkan kepada OJK. Namun demikian, pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah tidak mungkin dilakukan tanpa adanya stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kondisi ketidakseimbangan keuangan bersumber dari proses intermediasi yang mengalami gangguan.

Salah satu usaha untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah melalui kebijakan *makroprudential*. Hal tersebut dilakukan untuk menggantikan tugas mengatur dan mengawasi bank yang sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan makroprudential? Kebijakan *makroprudential* secara umum adalah kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam memelihara keseimbangan sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan beberapa tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan *Makroprudential*.
2. Melakukan Proses *Surveillance* atau Monitoring Sistem Keuangan.
3. Memfasilitasi Perluasan Akses Keuangan.

G. Organisasi dan Manajemen Bank Indonesia

Untuk melihat organisasi Bank Indonesia, maka dapat dilihat dari UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, termasuk hubungan Bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya, khususnya dengan DPR. Pengaturan dalam undang-undang ini mendasari bidang-bidang utama dalam organisasi sesuai dengan tujuan dan tugas yang telah ditetapkan, tingkat kewenangan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, visi dan misi, serta struktur organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sejalan dengan tugas tersebut, organisasi Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor moneter, sektor perbankan, dan sektor sistem pembayaran serta ditambah dengan satu sektor pendukung, yaitu sektor manajemen intern. Namun demikian, seiring dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) yang didorong oleh lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka organisasi Bank Indonesia pun mengalami perubahan sehingga menyisakan dua sektor utama yaitu Sektor Stabilitas Moneter serta Sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran ditambah dengan Manajemen Intern dan Jaringan Kantor baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berikut ini akan diuraikan beberapa tugas yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja di Kantor Pusat sesuai dengan pembagian sektornya.

1. Sektor Stabilitas Moneter

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diperlukan beberapa satuan kerjayang dikelompokkan dalam sektor stabilitas moneter untuk mendukung pencapaian tugas-tugas yang telah ditetapkan. Satuan kerja di sektor stabilitas moneter tersebut terdiri atas tujuh departemen, yaitu:

- a. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) yang membawahi grup *assesment* moneter, grup kebijakan moneter dan grup riset ekonomi.
- b. Departemen Statistik (DSta) yang membawahi grup statistik domestik, grup neraca pembayaran dan pengembangan statistik, serta divisi desiminasi statistik dan manajemen intern.
- c. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) yang membawahi grup pengembangan dan pengelolaan moneter, grup operasi moneter, dan grup manajemen resiko, pengelolaan sistem dan informasi.

- d. Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) yang membawahi grup manajemen devisa, grup analisis devisa dan pengelolaan devisa eksternal, grup manajemen resiko, setelmen dan sistem tresuri.
 - e. Departemen Internasional (Dint) yang membawahi kebijakan dan hubungan internasional dan grup studi internasional.
 - f. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) yang membawahi grup riset kebanksentralan, grup edukasi kebanksentralan, divisi perpustakaan dan manajemen internal.
 - g. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) yang membawahi grup pengelolaan dan Pengawasan Laporan 1, grup pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2 dan grup pengelolaan informasi dan Perkreditan Nasional.
2. Sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran

Dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia diperlukan pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan beberapa satuan kerja yang dikelompokkan dalam sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran untuk mendukung pencapaian tugas-tugas yang telah ditetapkan. Organisasi Sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia terdiri atas tujuh departemen. Tiga departemen terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan empat departemen terkait dengan stabilitas sistem pembayaran.

a. Stabilitas Sistem Keuangan

- 1) Departemen Kebijakan Makroprudential (DKMP) yang membawahi grup asesmen dan rekomendasi kebijakan makroprudential serta grup riset dan pengaturan makroprudential.
- 2) Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK) yang membawahi grup sektor keuangan 1, grup sektor keuangan 2, dan grup sektor keuangan 3.
- 3) Departemen Akses Keuangan dan KUMKM (DPAU) yang membawahi grup pengembangan keuangan inklusif dan grup pengembangan UMKM.

b. Stabilitas Sistem Pembayaran

- 1) Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) yang membawahi grup kebijakan dan perizinan sistem pembayaran dan grup pengawasan sistem pembayaran dan pedagang valuta asing.
- 2) Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) yang membawahi yang membawahi pengembangan dan pemeliharaan sistem pembayaran BI, grup penyelenggaraan sistem pembayaran BI.
- 3) Departemen Pengelolaan Uang (DPU) yang membawahi grup kebijakan pengelolaan uang dan grup operasional pengelolaan uang.
- 4) Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP) yang membawahi grup pengelolaan transaksi pemerintah dan BI serta Divisi Review Ketentuan dan Persyaratan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah dan BI.

Selain itu bidang-bidang di atas, terdapat beberapa fungsi bidang manajemen strategis yaitu perencanaan strategis, kebijakan organisasi dan manajemen SDM, risiko organisasi, pengawasan intern, hubungan masyarakat, dan pengembangan pengetahuan manajemen. Fungsi bidang manajemen pendukung di antaranya adalah pengendalian keuangan intern, anggaran, akunting dan laporan keuangan, pengelolaan logistik, serta kesekretariatan Dewan Gubernur.

Sesuai dengan undang-undang, dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputy gubernur senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang deputy gubernur. UU Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009, Pasal 38 ayat 1 menerangkan bahwa Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputy gubernur senior sebagai wakil. Dalam hal gubernur dan deputy gubernur senior berhalangan, gubernur atau deputy gubernur senior menunjuk seorang deputy gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Apabila karena sesuatu hal penunjukan itu tidak dapat dilaksanakan, salah seorang deputy gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Undang-undang UU Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 43 menyebutkan bahwa Rapat Dewan Gubernur (RDG) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipel dan strategis. Kebijakan prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak luas, baik ke dalam

maupun ke luar Bank Indonesia, misalnya, kebijakan umum moneter, kebijakan di bidang pengaturan dan kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan bank. RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Adapun cara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir.

Rangkuman (*Summary*)

- Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi.
- UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dimandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia terdiri atas: a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c) mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank dialihkan kepada OJK.
- Bank Indonesia melaksanakan kebijakan makroprudential sedangkan OJK melaksanakan kebijakan mikroprudential.
- Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.

- Bank Indonesia sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.
- Instrumen kebijakan moneter terdiri atas giro wajib minimum, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka dan himbauan moral.
- Organisasi Bank Indonesia terdiri atas dua sektor utama yaitu Sektor Stabilitas Moneter serta Sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran.

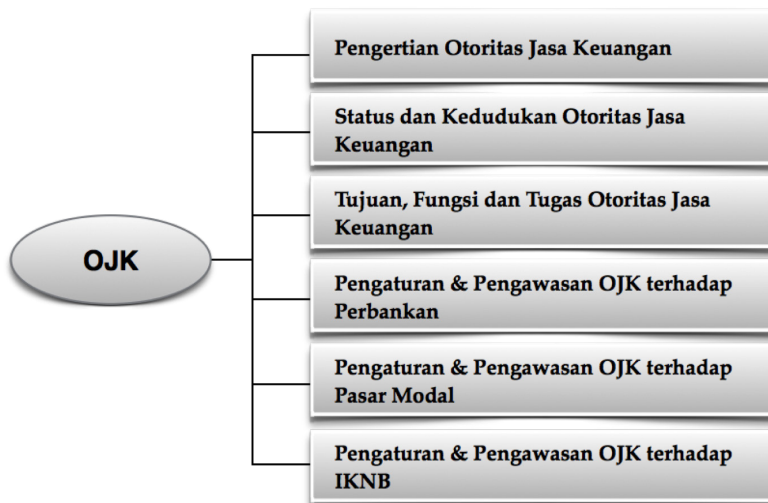
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website Bank Indonesia www.bi.go.id dan website OJK www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Bank Indonesia.

Bab 3

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peta Konsep (*Concept Maps*)



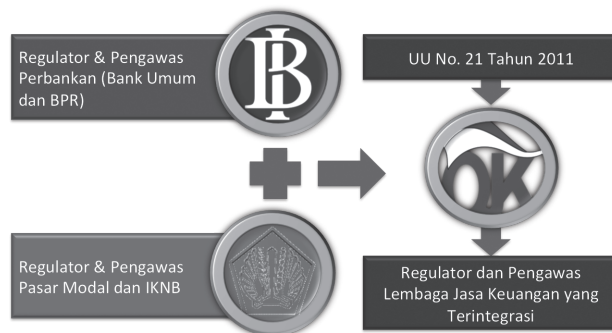
Kata Kunci (*Key Words*)

Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Pasar Modal, IKNB

A. Pengertian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.

Adanya OJK menjadikan otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain beralih dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke OJK. Demikian pula, otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Lembaga OJK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal tertentu yang diatur dalam UU OJK.



Bagan 3.1

Evolusi Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB

Berdasarkan bagan 3.1 dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya adalah perbankan, pasar modal dan Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

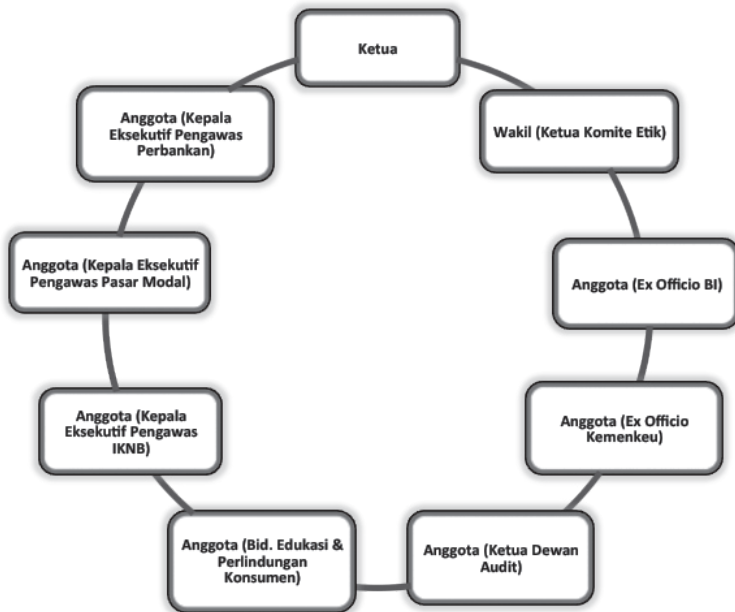
B. Status dan Kedudukan OJK

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 2 UU menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenanginya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa status dan kedudukan OJK merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi Pasar Modal, Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisiner beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. **Muliaman D. Hadad, PhD** merupakan ketua dewan komisiner OJK pertama.

Rapat Dewan Komisiner (RDK) merupakan forum pengambilan keputusan OJK tertinggi untuk menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Pengambilan keputusan RDK dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam RDK, anggota Dewan Komisiner memiliki hak suara yang sama, hal ini berarti se-

tiap Anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. RDK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner yang apabila berhalangan digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner. Sebagaimana diatur dalam UU OJK, RDK diselenggarakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua minggu, atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu Anggota Dewan Komisioner.



Bagan 3.2

Organisasi OJK

C. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tujuan di atas, OJK memiliki tiga tugas utama yaitu: *pertama*, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; *kedua*, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; *ketiga*, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan, fungsi dan tugas OJK dapat disederhanakan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan, Fungsi dan Tugas OJK

Tujuan	Fungsi	Tugas
<ol style="list-style-type: none">1. Agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil2. Agar mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.	Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berkoordinasi dengan otoritas lain, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam hal terjadi bank bermasalah dalam kesehatannya, OJK memberikan informasi kepada LPS. LPS juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya melalui koordinasi dengan OJK. Demikian pula apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau kesehatan bank memburuk, OJK menginformasikan bank tersebut ke Bank Indonesia agar melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya.

Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain meliputi:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu.
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, atau kegiatan usaha bank lain.
5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

D. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Perbankan

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Menurut data OJK, sampai dengan tahun 2013 terdapat 120 Bank Umum dan 1.653 BPR yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan Bank meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan

- akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank meliputi; Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; Sistem informasi debitur; Pengujian kredit (*credit testing*); dan Standar akuntansi bank.
 3. Wewenang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
 4. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank.

Khusus terkait dengan pengawasan bank, tugas OJK meliputi empat hal sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank; serta
4. Pemeriksaan bank.

E. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Pasar Modal

Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan jangka panjang melalui dua instrumen utamanya berupa obligasi dan saham. Sebelum berdirinya OJK, pasar modal diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Namun, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pengaturan dan pengawasan pasar modal tidak lagi menjadi tanggung jawab BAPEPAM-LK, melainkan menjadi wewenang OJK. BAPEPAM-LK sendiri ditiadakan, tepatnya efektif per 31 Desember 2012. Menurut data OJK, sampai dengan tahun 2013, terdapat 140 perusahaan efek yang berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK.

F. Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap IKNB

Sama halnya dengan pasar modal, sebelum berdirinya OJK, IKNB diatur dan diawasi oleh Menteri Keuangan dan BAPEPAM-LK. Namun per 31 Desember 2012, IKNB bersama pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK. Dalam rangka menjalankan tugas pengaturan industri jasa keuangan, OJK juga memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun terkait dengan tugas pengawasan industri jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan

8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha.
 - b. Izin orang perseorangan.
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - d. Surat tanda terdaftar.
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
 - f. Pengesahan.
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
 - h. Penetapan lainnya.

Setidaknya terdapat tiga jenis IKNB, yaitu: perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun mengumpulkan dana dari masyarakat sementara lembaga pembiayaan mendapatkan dana dari Bank dan penerbitan surat berharga untuk disalurkan sebagai konsumen finansial. Ketiga lembaga tersebut mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan melalui salah satu Dirjen yang mengatur atau mengawasinya dan pasca lahirnya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK tugas pengaturan dan pengawasan IKNB tersebut beralih ke OJK. Menurut data OJK bahwa sampai dengan tahun 2013, setidaknya terdapat 139 perusahaan perasuransian, 268 perusahaan dana pensiun dan 199 perusahaan pembiayaan yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Rangkuman (Summary)

- OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

- OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.
- Bank Indonesia melaksanakan kebijakan *makroprudential* sedangkan OJK melaksanakan kebijakan *mikroprudential*.
- Lembaga keuangan adalah badan usaha yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan terdiri atas bank dan IKNB.
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat.

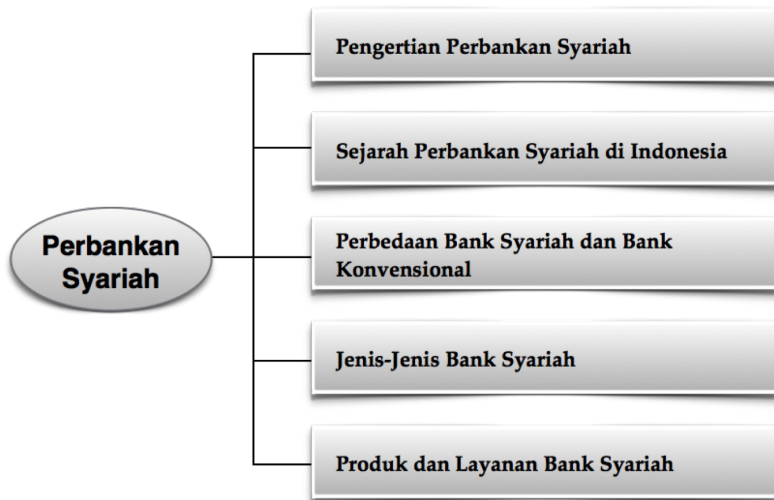
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website OJK www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bab 4

Perbankan Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Perbankan Syariah, Bank Syariah, Akad, *Funding*, *Financing*, *Profit Sharing*, Riba, *Maisyir*, *Gharar*

A. Pengertian

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank syariah operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di dunia yang sudah terjadi sejak tahun 1940-an berdampak ke Indonesia. Puncaknya terjadi pada tahun 1990. Tepatnya ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan

di Bogor Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari Lokakarya tersebut, Musyawarah Nasional Ke-IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22-25 Agustus 1990 membahas dan membentuk tim kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Produk dari tim kerja yang dibentuk MUI dalam Munas K-IV akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akta pendirian PT.BMI dan mulai beroperasi setelah diperoleh modal awal yang cukup yaitu pada 1 Mei 1992.

Dua tahun setelah BMI berdiri, berdiri pula Asuransi Syariah Takaful di tahun 1994. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula 78 BPR Syariah. Pada tahun 1996 berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah BMT dan akhirnya pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai BUMN pertama yang membuka jasa keuangan (perbankan) pola syariah. Kini, perbankan syariah menjamur di mana-mana, baik yang berstatus sebagai unit usaha dari bank konvensional maupun yang berstatus berdiri sendiri.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin cepat dan kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Menurut Data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Mei 2014, Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 11 yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia. Adapun BPR Syariah di Indonesia

sampai dengan tahun 2012 berjumlah 163 dan Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 23.

C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip kegiatan usahanya. Bank syariah prinsip hukumnya bersumber pada hukum Islam yang melarang hal-hal sebagai berikut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
2. Bunga (ربا - *riba*).
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر - *maisir*), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر - *gharar*).

Tabel 4.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam. ▪ Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa. ▪ Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam). ▪ Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. ▪ Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. ▪ Memakai perangkat suku bunga. ▪ Berorientasi keuntungan. ▪ Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. ▪ Penghimpunan dan penyaluran. ▪ Dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Syafi' Antonio (2001)

Dalam operasionalnya, diantara perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah Bank Syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil. Untuk mengetahui perbedaan antara bunga dan bagi hasil perhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. ▪ Besarnya bunga adalah suatu prosentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan. ▪ Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/ usaha yang dijalankan oleh nasabah / <i>mudharib</i> untung atau rugi. ▪ Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan besarnya <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi. ▪ Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh. ▪ Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan. ▪ Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh <i>mudharib</i>. ▪ Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.

Sumber : Muhammad Syafi' Antonio (2001)

D. Jenis-Jenis Bank Syariah

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa berdasarkan jenisnya, Bank Syariah terbagi menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPR Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kecuali BPR tertentu yang sudah memiliki ijin dari Bank Indonesia.

Selain Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, terdapat pula Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang (Kancab) pembantu syariah dan/atau unit syariah.

E. Produk dan Layanan Bank Syariah

Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), produk bank terdiri atas tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang secara umum dapat disebut dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat diartikan juga sebagai simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

tu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN/*Personal Identification Number*).

Adapun giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Rekening Giro (*Curren Account*) dapat diartikan juga sebagai salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening Giro. Cek terdiri atas tiga jenis yakni sebagai berikut:

1. Cek Atas Nama (*Older Cheque*)

Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada Cek tersebut.

2. Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*)

Cek Atas Unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang diterima pada cek tersebut.

3. Cek Silang (*Cross Cheque*)

Cek Silang adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada unjuk kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah keujung kanan atas. Cek Silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima Cek.

Sementara deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Dalam produk deposito, dikenal adanya istilah deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito Berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6 dan 12 sampai dengan 24 bulan. Deposito Berjangka diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setiap jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran bunga dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindah-bukuan). Kepada setiap deposan dengan nilai deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterima dan jika dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka umumnya dikenakan denda.

Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan jangka waktu 1 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Sertifikat Deposito dapat diperjual-belikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka, setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.

Di sisi lain, dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*), bank memiliki produk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Beberapa bentuk kredit bank diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, KUR, dan kredit konsumtif. Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya diantaranya Transfer (Kiriman Dana); *Safe Deposit Box (SDB)*; Bank Garansi; Inkaso (*Collection*); Kliring (*Clearing*); *Bancassurance*; Debit Card; Credit Card; Bank Notes; Referensi Bank; Bank Draft; *Letter of Credit (L/C)*; *Traveller's Cheque*; dan *Money Changer*.

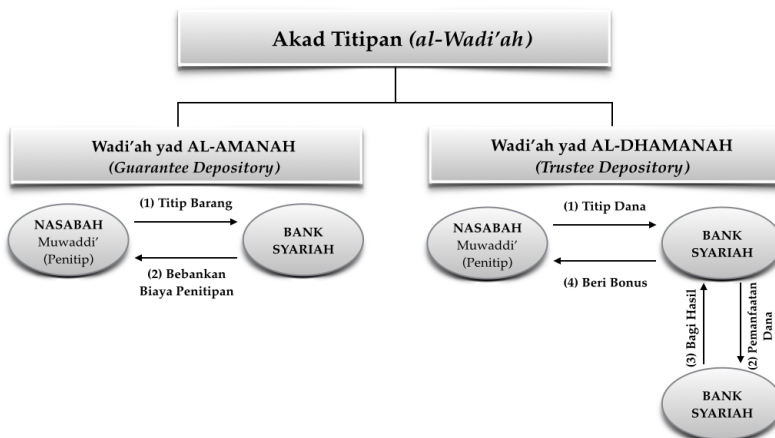
Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus, secara umum produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*services*)

Dalam penyediaan produk penghimpunan dana dari nasabahnya, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal sebagaimana yang diterapkan di bank konvensional. Menurut Adiwarman A. Karim (2004) bahwa prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip Wadi'ah

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keuntungan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.



Bagan 4.1.
Jenis Akad Wadi'ah

2. Prinsip Mudharabah

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah*. Tujuan akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan transaksi dalam bentuk akad *mudharabah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito.

Tabel 4.3. Karakteristik Produk Pendanaan Bank Syariah

KARAKTERISTIK	AKAD PENDANAAN		
	MUDHARABAH	WADI'AH AMANAH	WADI'AH DHOMANAH
Jangka waktu pengembalian	Sesuai perjanjian	Setiap saat	Sesuai perjanjian
Pemanfaatan oleh penerima simpanan	Dibolehkan	Tidak boleh	Dibolehkan dengan persetujuan
Keuntungan	Bagi Hasil	Tidak ada	Bonus
Prinsip syariah	Berserikat	Titipan murni	Titipan

Penanggung Resiko	Penyimpan	Penyimpan	Penerima Simpanan
Jenis barang	Uang	Uang dan barang	Uang dan barang

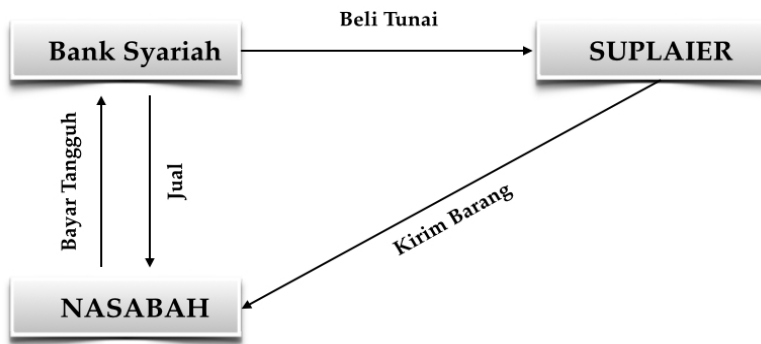
Dalam menyalurkan dananya kepada para nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim (2004) bahwa secara umum produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi empat yakni:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Rukun jual beli terdiri atas lima yakni; 1) penjual, 2) pembeli, 3) barang yang dijual, 4) harga, dan 5) *ijab qabul* (perjanjian/persetujuan).

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*. *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah. Adapun *Salam* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran

kemudian. Sedangkan *istishna'* adalah perjanjian sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk manfaat barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik.



Bagan 4.2

Skema Pembiayaan Murobahah

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli, objek transaksinya adalah barang sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

likan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ketentuan umum dalam pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke Bank Syariah
- b. Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya kepemilikannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah kepada bank
- e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut disimpan di bank sebagai aset untuk disewakan kembali.
- f. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.

Adapun jenis barang/jasa yang dapat menjadi objek ijarah diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang modal
- b. Barang produksi
- c. Barang kendaraan transportasi
- d. Jasa untuk membayar ongkos: Uang sekolah / kuliah, tenaga kerja, hotel, dan transportasi

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kontrak pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil.



Bagan 4.3

Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
 2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b. *Pembiayaan Mudharabah*
- Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, dimana *shahibul maal* menyediakan dana sedangkan *mudharib* menjadi pengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah al mutlaqah* dan *mudharabah muqqayadah*. *Mudharabah al mutlaqah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan dana dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun *mudharabah muqqayadah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan dana dan memberikan kewenangan terbatas kepada

mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.



Bagan 4.4

Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dengan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek.
 - Perhitungan dari keuntungan proyek.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menang-

gung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban maka ia dapat dikenakan sanksi administratif.

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

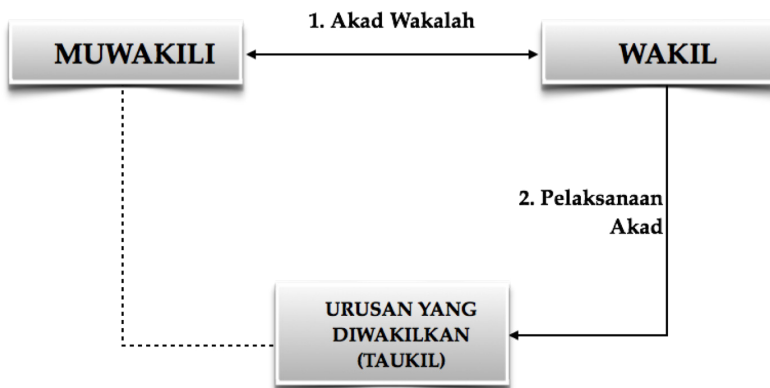
Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Akad pelengkap di Bank Syariah diantaranya adalah *Hiwalah* (alih utang – piutang), *rahn* (gadai), *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*. Sebagai ilustrasi, berikut digambarkan skema akad *wakalah*, *rahndan* *qardh*.

a. *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dapat dimaknai juga sebagai akad perwakilan anatara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Atas hal tersebut, bank berhak meminta imbalan berupa *fee* yang ditetapkan

di awal. Syarat dalam akad wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan).
 - Harus pemilik sah.
 - Orang mukhalaf dalam batas-batas tertentu.
- 2) Syarat wakil (yang mewakili)
 - Cakap hukum.
 - Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - Tidak bertentangan dengan syariat islam.
 - Dapat diwakilkan menurut syariat islam.
- 4) Ijab qobul



Bagan 4.5
Skema Akad Wakalah

b. *Qardh*

Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Bank Syariah pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan yang ditentukan, baik di awal maupun didepan. Dengan kata lain, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur *fiqh*, *al-qard* dikategorikan sebagai *aqdtathawwu'I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan dalam bentuk:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha kecil tersebut jika diberi pinjaman dengan akad jual beli, ijarah atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas tersebut untuk memas-

tikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman tersebut secara cicilan melalui pemotongan gaji.



Bagan 4.6

Skema Akad Qardh

c. *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) adalah akad menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil utang. *Ar Rahn* berarti juga *pawn* (gadai) yaitu kontrak penjaminan dan mengikat pada saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Muhammad Syafi' Antonio (2001) mengartikan bahwa *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memiliki jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang akad-akad penyaluran dana atau pembiayaan di Bank Syariah, berikut akan digambarkan matrik karakteristik dari masing-masing akad pembiayaan tersebut.

Tabel 4.4. Karakteristik Akad Pembiayaan

ASPEK PEMBIAYAAN	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	BAI' BITSAMAN 'AJIL	MURABAHAH	QORDUL HASAN
Prinsip syariah	Bagi hasil	Bagi hasil	Mark up (marjin keuntungan)	Mark up	Kebajikan
Sumber Modal	Uang tunai	Uang tunai + harta nilai dalam uang	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai
Pengelola/manajemen	Nasabah	Nasabah + Bank Syariah	Nasabah	Nasabah	Nasabah
Pembagian keuntungan	% kesepakatan	% kesepakatan	Tidak ada	Tidak	Tidak ada atau bonus
Resiko	Bank Syariah	Bank Syariah + Nasabah	Nasabah	Nasabah	Bank Syariah
Waktu pengembalian	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai perjanjian Jangka pendek/ menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai perjanjian Jangka pendek /menengah /panjang 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai perjanjian Jangka pendek/ menengah/ panjang 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai perjanjian Jangk pendek 	<ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek
Cara pengembalian	Angsur	Angsur	Angsur	Jatuh tempo	Angsuran/jatuh tempo
Agunan	Tidak disyaratkan	Jika perlu	Jika perlu	Jika perlu	Jika perlu

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Muhammad Syafi' Antonio (2001) mengartikan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing tersebut.

Melengkapi pendapat Adiwarmanto Karim sebelumnya, Muhammad (2005) mengungkapkan bahwa pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana

Bank syariah dalam penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Titipan (*Al-wadiah* atau simpanan)

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al wadiah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al wadiah* yaitu *Wadiah yad al amanah* dan *Wadiah yad adh-dhamanah*.

c. Investasi (*mudharabah* atau *trust investment*)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Berdasarkan kewenangan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi yaitu:

1) *Mudharabah mutlaqah*

2) *Mudharabah muqayadah*

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

b. Prinsip sewa (*operating lease* dan *financial lease*)

c. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

3. Akad Pelayanan Jasa

Akad pelengkap dikembangkan akad pelayanan jasa, akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- a. Alih utang-piutang (*al-hiwalah*) transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *al-hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank syariah mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- b. Gadai (*rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:
 - 1) Milik nasabah sendiri.
 - 2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasar.
 - 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- c. *Al-qardh* (pinjaman kebaikan). *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.
- d. *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti : transfer dan sebagainya.
- e. *Kafalah*. Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*, bank syariah dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

Rangkuman (*Summary*)

- Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- BPR Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kecuali BPR tertentu yang sudah memiliki ijin dari Bank Indonesia.
- Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang (Kancab) dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- Produk bank syariah secara umum dapat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut: Produk Penghimpunan Dana (*funding*), Produk Penyaluran Dana (*financing*) dan Produk Jasa (*services*).

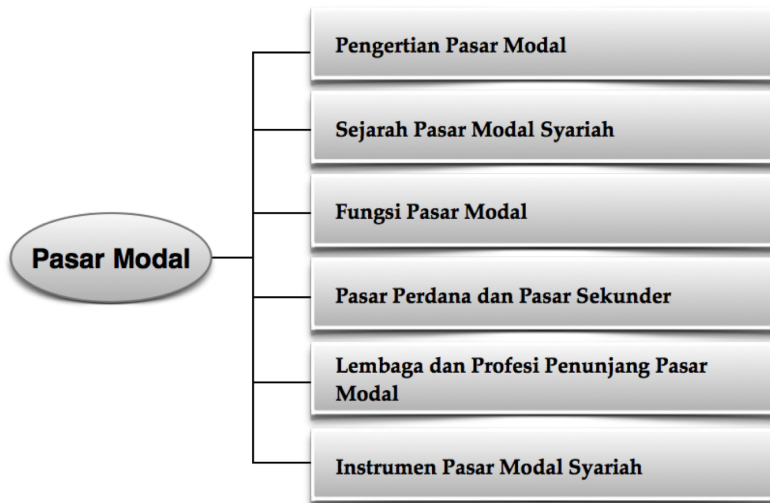
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website OJK www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya direktorat perbankan syariah atau bank syariah terdekat.

Bab 5

Pasar Modal

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Pasar Modal, Bursa Efek, *Go Public*, Emiten, Efek, Saham, Obligasi, Produk Derivatif, *Capital Gain*, Deviden.

A. Pengertian

Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah apa sesungguhnya pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga, atau pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang (seperti saham dan obligasi) sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Adapun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal mengartikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Secara umum pasar modal dapat dimaknai juga sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal atau efek. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintahan melalui perdagangan surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi.

Adapun pasar modal syariah menurut Andri Soemitra (2009) adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah itu? Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada syariat Islam sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI.

Dalam pengertian di atas disebutkan istilah efek. Efek adalah surat berharga jangka panjang, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Adapun efek syariah adalah efek yang akad, manajemen emiten, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran Islam sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI.

B. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management mengeluarkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen tersebut merupakan

Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Dalam rangka memperkuat keberadaan pasar modal syariah, pada tanggal 14 Maret 2003 dibuat MoU antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan menggembirakan terjadi pada tahun 2008 dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang tersebut diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008

untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 30 Juni 2009. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.

DES yang diterbitkan Bapepam-LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. DES Periodik: DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007.
2. DES Insidentil: DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik. Penetapan saham emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam- LK meliputi:

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini.
4. Saham Reksa Dana Syariah.
5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah.
6. Efek Beragun Aset Syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13.
 - b. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus).

- Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).
- c. Efek syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan efek syariah lainnya.

C. Fungsi Pasar Modal

Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang dan sebagainya, pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan dunia usaha. Apa sesungguhnya fungsi pasar modal itu? Setidaknya terdapat empat fungsi pasar modal sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi yakni fungsi pasar modal dalam menyediakan fasilitas atau media yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Pasar modal memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau para investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di pasar modal.

Para investor menanamkan modalnya di pasar modal dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) berupa deviden dan *capital gain*. Sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi baru dan modal kerja dalam

rangka mengembangkan kegiatan usahanya tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan itu sendiri. Dengan saling bertemunya antara para investor dan perusahaan yang memerlukan dana pengembangan, maka diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan yang ada sehingga produksi nasional, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara umum dapat meningkat.

2. Fungsi Keuangan

Fungsi keuangan maksudnya bahwa dengan adanya pasar modal dapat memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan besar sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar. Di pasar modal uang berputar antar perusahaan dan antar investor. Pasar modal dapat menjadi wahana pengumpulan modal yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

3. Fungsi Tabungan

Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal memberikan jalan yang mudah bagi pelakunya untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Dana tersebut digunakan untuk memperbanyak barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menabung hingga mampu memperbaiki kondisi hidupnya.

4. Fungsi Likuiditas

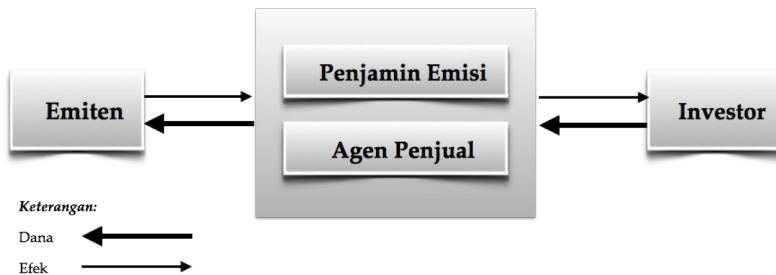
Kekayaan yang disimpan dalam bentuk surat berharga bisa dilikuiditas (dicairkan) melalui pasar modal. Proses likuidasi surat berharga dilakukan dengan relatif murah dan cepat. Dengan demikian, pasar modal merupakan pasar yang siap untuk melayani pemenuhan kebutuhan pemegang surat berharga.

D. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Berdasarkan aktivitasnya, terdapat dua jenis pasar dalam praktik pasar modal yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar Perdana disebut juga dengan *Initial Public Offering (IPO)* yaitu pasar tempat perusahaan atau *emiten* pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum (*publik*). Proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar perdana dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 5.1

Mekanisme Transaksi di Pasar Perdana

Merujuk kepada bagan 5.1 di atas, jelas bahwa dalam Pasar Perdana, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah emiten dan sebagai pembeli adalah investor. Tahukah kamu apa itu emiten? Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dalam hal ini perusahaan yang pertama kali melakukan *go public*, yakni menjual kepemilikan modalnya ke masyarakat luas. Manfaat *Go Public* diantaranya:

- a. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru.
- b. Memberi Keunggulan Kompetitive untuk Pengembangan Usaha.
- c. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.
- d. Peningkatan kemampuan going concern.
- e. Meningkatkan citra perusahaan.
- f. Meningkatkan nilai perusahaan.

Emiten dengan bantuan penjamin emisi dan agen penjual menawarkan sahamnya ke para investor, investor yang merasa tertarik dengan penawaran emiten melakukan pembelian melalui agen penjual sehingga terjadilah transaksi dimana dana mengalir dari investor ke emiten dan efek atau surat berharga mengalir dari emiten kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual.

Penawaran perdana saham atau IPO merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual saham baru kepada masyarakat umum. Emiten berharap semua saham yang dilepas ke publik dapat terserap sepenuhnya sehingga target pendapatan yang diharapkan dapat ter-

penuhi. Sebaliknya, para pemodal berharap mendapatkan keuntungan dengan membeli saham tersebut, baik berupa deviden, *capital gain* maupun hak-hak lain sebagai pemegang saham.

Perusahaan yang melakukan penjualan saham ke publik diharuskan untuk membuat prospektus. Menurut Bapepam, Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Dengan adanya prospektus, pemodal akan mendapatkan seluruh informasi penting dan relevan sehubungan dengan kegiatan penawaran tersebut sehingga pemodal dapat mengambil keputusan investasi secara tepat. Penyusunan prospektus harus mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Prospektus harus membuat semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten.
- b. Prospektus haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif
- c. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkap pada bagian awal prospektus.
- d. Emiten, Penjamin Pelaksanaan Emisi, Lembaga Penunjang serta Profesi Penunjuang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta secara jelas dan mudah dibaca.

Beberapa bagian penting dari prospektus yang patut mendapat perhatian dari calon investor adalah:

- a. Jumlah saham yang ditawarkan
- b. Nilai nominal dan harga penawaran

- c. Bidang usaha
- d. Riwayat singkat perusahaan
- e. Tujuan *go public* (rencana penggunaan dana)
- f. Kegiatan dan proses usaha
- g. Risiko usaha
- h. Kebijakan deviden
- i. Kinerja keuangan perusahaan
- j. Agen-agen penjual

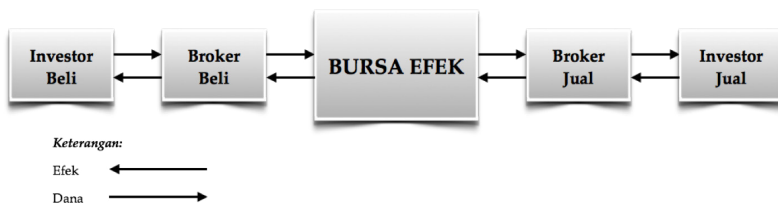
Dalam prospektus juga biasanya terdapat beberapa hal terkait jadwal penawaran umum, diantaranya:

- a. Tanggal efektif, adalah suatu tanggal yang menunjukkan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Efektif oleh Bapepam, berdasarkan surat tersebut maka perusahaan dapat melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat.
- b. Masa penawaran, adalah suatu periode di mana dilakukannya penawaran umum atas efek yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Masa penawaran ini sekurang-kurangnya tiga hari kerja.
- c. Tanggal akhir penjatahan, adalah suatu tanggal di mana hasil akhir dari proses penjatahan atas pesanan efek akan diumumkan kepada masyarakat. Penjatahan akan muncul apabila jumlah pesanan atas efek melebihi dari jumlah efek yang ditawarkan.
- d. Tanggal pengembalian uang pesanan, adalah suatu tanggal dimulainya pengembalian uang kepada pemesan yang terkena penjatahan atau yang pesannya tidak terpenuhi seluruhnya

- e. Tanggal pencatatan, adalah suatu tanggal dimana suatu efek mulai dicatatkan atau didaftarkan pada suatu bursa efek, yang berarti mulai tanggal itu pula efek tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Pasar Sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau setelah pasar perdana, perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor lainnya, transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini hanya pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan pasar. Proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar sekunder dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 5.2

Mekanisme Transaksi di Pasar Sekunder

Merujuk kepada bagan 5.2 di atas, jelas bahwa dalam Pasar Sekunder, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah investor jual dan sebagai pembeli adalah investor beli melalui broker jual dan broker beli yang bertemu

di bursa efek. Tahukan Anda apa itu bursa efek? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Apa itu broker jual? Broker jual adalah pihak yang menjadi perantara investor jual untuk menawarkan surat berharga yang dimilikinya kepada investor beli melalui broker beli di bursa efek, sedangkan broker beli adalah pihak yang menjadi prantara investor beli untuk melakukan pembelian sejumlah surat berharga dari investor jual melalui broker jual di bursa efek. Interaksi antara investor beli dan invetor jual melalui broker masing-masing terjadilah transaksi yang menyebabkan efek berpindah tangan dari investor jual kepada investor beli dan dana mengalir dari investor beli kepada investor jual.

Berdasarkan deskripsi di atas, apakah Anda sudah dapat menarik benang merahnya apa perbedaan antara pasar perdana dengan pasar sekunder? Untuk mempermudah dalam membuat perbedaannya, coba perhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perbedaan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Pasar Perdana	Pasar Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> • Harga saham tetap. • Tidak dikenakan komisi. • Hanya untuk pembelian saham. • Pemesanan dilakukan melalui Agen Penjual. • Jangka waktu terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar. ▪ Dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. ▪ Pemesanan dilakukan melalui Anggota Bursa. ▪ Jangka waktu tidak terbatas.

E. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pernahkah Anda mendengar istilah broker atau pialang? Broker atau pialang adalah perantara proses jual beli saham dan obligasi di pasar modal. Menjadi Pialang berarti menjadi perantara jual atau beli dari pemodal. Para pemodal akan menyampaikan pesan jual atau beli kepada setiap pialang. Atas jasanya menjualkan maupun membelikan saham/obligasi bagi pemodal, pialang mendapat balas jasa (*fee*) yang besarnya ditentukan antara pemodal dan pialang. Apakah Anda tertarik untuk menjadi pialang? Pada bagian ini akan diuraikan tentang lembaga-lembaga penunjang pasar modal Indonesia selain perantara perdagangan efek yang biasa disebut Pialang atau Broker.

1. Bursa Efek

Perdagangan surat-surat berharga di pasar modal mempunyai tata cara tersendiri yang jauh berbeda dengan jual beli barang dan jasa pada umumnya. Pasar modal memperjualbelikan kertas yang bernama saham dan obligasi yang seiring dinamakan surat berharga jangka panjang. Kertas berharga itu adalah wujudnya, tetapi makna sebenarnya yang diperjual belikan adalah hak pembeli (pemodal) yang melekat pada saham/obligasi itu. Pemodal saham misalnya mempunyai hak suara dalam RUPS, memperoleh dividen dan menikmati *capital gain*.

Pada dasarnya jual beli saham adalah jual beli hak atas perusahaan yang mengeluarkan saham yang bersangkutan. Pemegang saham mempunyai hak sebagai pemilik perusahaan. Apabila diidentikan dengan jual beli suatu barang di pasar, maka calon pembeli saham harus datang sendiri ke perusahaan, mengamati sendiri peru-

sahaan yang bersangkutan sebelum diputuskan untuk dibeli atau tidaknya saham tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana rumit dan tidak efisien bila cara seperti itu dilaksanakan karena calon pembeli (pemodal) yang banyak itu akan datang semua ke Perusahaan.

Boleh jadi pekerjaan manager akan beralih dari mengurus perusahaan menjadi mengurus calon-calon pembeli saham. Peninjauan perusahaan oleh calon pembeli yang sesaat itu adalah mustahil untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan potensi perusahaan itu sendiri sebenarnya. Membaca informasi perusahaan baik mengenai masa lampainya, masa kini, dan gambaran perkembangannya dimasa datang lebih bermanfaat untuk menilai kondisi dan potensi perusahaan daripada dating meninjau perusahaan yang hanya sesaat itu.

Untuk menjadikan saham-saham yang telah dibeli pada pasar perdana sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan dengan mudah serta untuk menghindari calon pembeli saham/obligasi berduyun-duyun datang ke perusahaan maka disediakanlah suatu tempat untuk memperdagangkan saham/obligasi. Tempat ini dinamakan "Bursa Efek". Bagi calon pembeli (pemodal) disediakan informasi perusahaan. Informasi perusahaan disajikan dalam prospectus, pada waktu mengadakan emisi, atau disajikan dalam gambaran singkat mengenai perusahaan (*company profile*) bagi perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa. Kalau hendak memilih perusahaan (*baca*: saham perusahaan) bacalah informasi mengenai perusahaan itu, tidak perlu menengok dulu perusahaannya.

Menurut Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain, dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sejak tahun 2007, Bursa Efek di Indonesia hanya satu yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berkedudukan di Jakarta.

2. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Penjamin emisi yang juga dikenal dengan nama *underwriter* adalah lembaga yang akan menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Penjamin emisi akan mengambil resiko untuk menjualkan saham. Kesanggupan penjamin emisi itu mengandung risiko, maka sebelum menyatakan kesanggupannya, penjamin emisi harus mempelajari dulu kemampuan emiten, dan juga memperkirakan kemampuan pemodal yang tertarik pada saham/obligasi perusahaan yang dijaminnya itu. Atas dasar kemampuan dua pihak itu, maka terjadi tidaknya penjualan saham/obligasi itu akan sangat tergantung kepada harga berapa saham/obligasi perusahaan dijual.

Meskipun harga saham/obligasi ditentukan bersama oleh emiten dan penjamin emisi, namun atas harga yang disepakati itu optimisme masing-masing pihak dapat berbeda-beda. Khususnya bagi penjamin emisi,

meskipun keadaan perusahaan (emiten) mendukung harga saham, tetapi bila kemampuan investor (pemodal) meragukan maka optimisme atas penjualan saham/obligasi perusahaan menjadi berkurang. Salah satu cara untuk mengambil jalan tengah dalam situasi demikian, penjamin emisi dapat memilih salah satu tipe penjaminan yang ada. Terkait dengan tipe penjaminan, pada umumnya dikenal empat macam tipe penjamin emisi dalam praktik di pasar modal:

a. Kesanggupan Penuh (*Full/Firm Commitment*)

Dalam hal ini penjamin emisi menyatakan kesanggupan penuh (*full commitment*) terkait dengan saham/obligasi terjual sebagian maupun seluruhnya, penjamin emisi akan membeli seluruh saham/obligasi yang tidak laku itu dengan harga yang sama dengan harga penawaran kepada pemodal secara umum. Misalnya emiten mengadakan emisi sejumlah 5 juta saham harga penawaran Rp.50.000,- per saham. Pada pasar perdana saham hanya laku 3 juta saham. Penjamin emisi akan membeli sisanya yang tidak laku (2 juta saham) dengan harga Rp. 50.000,- per saham. Penjaminan *full commitment* seperti itu berlaku urutan “menjual dan membeli” (*sell and purchase*), karena jika tidak laku baru dibeli.

b. Kesanggupan Terbaik (*Best Efforts Commitment*)

Kesanggupan model ini hanya menuntut penjaminan emisi agar berusaha sebaik mungkin menjual saham/obligasi emiten supaya banyak/semuanya laku. Bila pada akhirnya masa penjualan masih ada saham/obligasi yang tidak laku, saham/obligasi itu akan

dikembalikan kepada emiten. Tidak ada kewajiban bagi penjamin emisi untuk membeli saham-saham yang tidak laku itu.

c. Kesanggupan Siaga (*Standby Commitment*)

Menurut kesanggupan siaga ini, bila ada saham/obligasi yang tidak laku sampai batas waktu penjualan yang telah ditentukan, penjamin emisi akan bersedia pula membeli saham/obligasi yang tidak laku itu. Hanya saja harga pembelian oleh penjamin emisi itu tidak sama dengan harga penawaran umum. Harga pembelian bagi saham/obligasi yang tidak laku telah diperjanjikan sebelumnya, tentunya berada di bawah harga penawaran umum.

d. Kesanggupan Semua atau Tidak Sama Sekali (*All of None Commitment*)

Penjamin emisi akan berusaha menjual saham/obligasi emiten sampai laku semua. Bila saham/obligasi yang ditawarkan itu tidak laku semua, maka saham/obligasi yang telah di pesan oleh pemodal, transaksinya dibatalkan. Jadi semua saham/obligasi tidak jadi dijual, dikembangkan kepada emiten, dan emiten tidak mendapatkan sedikit dana pun. Komitmen itu timbul dengan latar belakang bahwa perusahaan membutuhkan modal dalam skala tertentu. Bila jumlah itu tidak tercapai berarti investasi perusahaan kurang bermanfaat. Oleh karena itu lebih baik tidak jadi sekalian.

Bagaimana yang berlaku umum di Indonesia? Dalam kehidupan pasar modal Indonesia, penjamin emisi dan emiten sebagian besar memilih tipe

penjaminan kesanggupan penuh (*full commitment*). Melalui tipe penjaminan ini emiten selalu menjamin akan memperoleh dana sejumlah yang diinginkan-nya dan Penjamin Emisi menuntut balas jasa (*fee*) yang memadai atas kemungkinan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam perundingan, mereka harus lebih berhati-hati untuk menentukan harga penawaran suatu saham/obligasi

Berdasarkan fungsi tanggung jawabnya, dapat dibedakan tingkatan *underwriter* sebagai berikut:

a. Penjaminan Utama Emisi (*Lead Underwriter*)

Underwriter ini membuat ikatan dengan emiten dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian emisi efek. Dalam perjanjian ini *Lead Underwriter* memberikan jaminan penjualan efek dan pembayaran seluruh nilai efek kepada emiten. Apabila (*Lead Underwriter* lebih dari satu, maka jaminan tersebut diberikan secara bersama-sama.

b. Penjaminan Pelaksana Emisi (*Managing Underwriter*)

Dalam suatu indikasi, terdapat satu atau lebih penjaminan utama emisi. Dengan demikian, penjaminan pelaksanaan emisi mempunyai tugas sentral karena dialah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan serta menyelenggarakan aspek administrasi emisi efek. Dalam pelaksanaannya, penjaminan pelaksanaan emisi mengkoordinasikan seluruh proses emisi termasuk penyiapan dokumen, distribusi prospektus dan formulir pendaftaran, mengatur penyetoran uang pembelian, dan mengatur

penjataan dan penyampaian sertifikat saham/obligasi. *Managing Underwriter* ini merupakan salah satu dari anggota penjamin utama emisi.

c. Penjamin Peserta Emisi (*Co Underwriter*)

Underwriter ini ikut serta menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek kepada penjamin utama emisi sesuai dengan bagian yang diambilnya. Dengan demikian *Underwriter* tidak bertanggungjawab kepada emiten, tetapi bertanggung jawab kepada penjaminan utama emisi.

3. Penanggung (*Guarantor*)

Penanggung adalah lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Sebagai penengah yang meningkatkan kepercayaan antara yang memberikan kepercayaan dan yang membutuhkan kepercayaan juga berlaku di pasar modal. Peranan penanggung itu semakin diperlukan jika perbandingan utang dengan jumlah seluruh kekayaan perusahaan melalui tingkat perbandingan (*ratio*) yang telah ditentukan oleh Materi Keuangan.

Dalam situasi tertentu, ada kalanya perusahaan bersama penjamin emisi tetap menyetujui pemanfaatan jasa penanggung, meskipun perusahaan masih dalam batas ketentuan. Dalam hal demikian, jasa penanggung diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan calon pemodal pada perusahaan, sehingga obligasi yang diterbitkan menarik bagi pemodal. Atas jasa yang diberikannya itu penanggung memperoleh imbalan jasa (*fee*) dari emiten. Besarnya imbalan jasa kesempatan mereka bersama.

Dalam konteks pasar modal Indonesia yang dapat ditunjuk sebagai penanggung adalah Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk dapat beroperasi sebagai penanggung, lembaga-lembaga itu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan.

4. Wali Amanat (*Trustee*)

Peran Wali Amanat biasanya hanya diperlukan pada emisi obligasi. Istilah aslinya dari bahasa Inggris adalah *Bond Trustee*. Lembaga ini akan bertindak sebagai wali dari si pemberi alamat. Dalam hubungan penerbitan obligasi, pemberi amanat adalah pemodal sehingga Wali Amanat mewakili kepentingan pemodal.

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan melalui pasar modal selama ini adalah obligasi dengan jaminan. Artinya pinjaman obligasi itu dijamin oleh kekayaan perusahaan itu sendiri. Kekayaan perusahaan yang menjadi jaminan semestinya berada dalam pengawasan pemodal yang memberikan pinjaman. Seperti harta perusahaan yang menjadi jaminan kredit bank, berada dalam pengawasan bank yang memberikan kredit. Oleh karena itu maka dalam emisi obligasi harus juga ada hak pemodal untuk mengawasi perusahaan (emiten). Untuk keperluan itulah maka emiten obligasi harus pula menunjuk Wali Amanat selain penanggung.

Tugas Wali Amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, sehingga Wali Amanat berada pada sisi pemodal. Berkaitan dengan tugasnya itu, maka Wali Amanat melakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a) Menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten.
Apakah secara oprasional perusahaan (emiten)

- mempunyai kemampuan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya. Selain itu Wali Amanat harus pula mengetahui apakah perusahaan mempunyai reputasi baik dalam membayar utang.
- b) Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan. Wali Amanat harus mengetahui dengan pasti apakah nilai kekayaan emiten yang menjadi jaminan, setara (memadai) nilai obligasi yang diterbitkannya.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi menjamin tadi dialihkan pemanfaatan atau pemilikannya haruslah sepengetahuan Wali Amanat.
 - d) Mengikuti terus menerus perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat kepada emiten.
 - e) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi. Wali Amanat harus mengikuti apakah emiten telah membayarkan bunga maupun pokok pinjaman yang menjadi hak pemodal tepat pada waktunya.
 - f) Sebagai Agen Utama Pembayaran. Untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok, maka Wali Amanat, dapat bertindak sebagai agen utama pembayaran.

Sekarang ini lembaga yang dapat menjadi Wali Amanat adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Untuk dapat beroperasi sebagai Wali Amanat lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai tenaga ahli dalam bidang perwali-amanatan. Setelah persyaratan dipenuhi, harus pula mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI. Atas jasanya mewakili kepentingan pemodal, Wali Amanat memperoleh balas jasa (*fee*) dari emiten. Wali Amanat

memang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan pemodal, karena itu *fee*-nya dibayar oleh emiten.

5. Perantara Perdagangan Efek (Pialang, Broker)

Apakah setiap calon pemodal harus datang sendiri di Bursa Efek dan ikut langsung jual beli dilantai Bursa? Jika hal itu yang berlaku pasti lantai Bursa tidak mencukupi. Perusahaan-perusahaan yang menjual bursa banyak, dan ratusan bahkan ribuan jika pasar modal sudah maju. Belum lagi calon-calon pembeli dan penjual saham yang datang pasti lebih banyak lagi. Keadaan serupa itu pasti dapat menjamin terselenggaranya perdagangan yang terbit.

Dalam perdagangan saham/obligasi di Bursa dituntut suatu kode etik tersendiri, disiplin dalam prosedur, tanggungjawab dalam tindakan dan perkataan. Jual beli yang telah disepakati walaupun satu detik yang lalu, tidak dapat dibatalkan apabila telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya terhadap suatu saham telah dilakukan tawar menawar lalu disepakati untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,-per saham. Dua menit kemudian ada lagi pembeli saham mau membeli harga saham tersebut dengan harga Rp. 60.000,-per saham. Dalam hal demikian dengan alasan apapun penjual tidak dapat membatalkan keputusannya untuk menjual dengan harga Rp. 50.000,- per saham. Awal persetujuan jual atau awal persetujuan beli di dalam harga yang diinginkan pada papan tulis. Karena itu diantara mereka yang turut menjual atau membeli mengatur istilah: perkataan saya adalah jaminan saya (*my word is my bond*). Oleh karena itu, orang-orang yang dapat masuk ke lantai bursa untuk melakukan perdagangan haruslah tertentu

tu. Mereka yang diperkenankan masuk ke lantai Bursa adalah Perantara Perdagangan Efek, yang sering dikenal dengan sebutan Broker atau Pialang.

Pemodal yang ingin membeli atau menjual saham/obligasi harus menyampaikan amanat jual atau belinya kepada Pialang yang ia percayai. Pemodal sendirilah yang menentukan saham/obligasi apakah yang ingin dibeli atau dijual dengan harga berapa. Misalnya pemodal ingin membeli saham PT "X" sebanyak 2.000 saham dengan harga Rp. 15.000,- per saham. Keinginan itu cukup disampaikan kepada Pialang dengan mengisi formulir yang disebut formulir pesanan.

Untuk membeli juga dilakukan cara yang sama. Pesanan pemodal itu akan dicarikan penjual atau pembeli di Bursa. Setiap Pialang mendapat amanat jual maupun amanat beli. Karena pemodal banyak, maka jual atau beli yang disampaikan kepada para pialang juga banyak, sehingga kemungkinan besar akan ada pesan jual dan beli yang terakhir pada harga tertentu untuk tercapainya transaksi. Harga jual atau beli yang dipesankan pada pialang bukanlah satu-satunya tingkat harga yang boleh dilaksanakan oleh pialang. Pialang boleh saja menjual atau membeli di luar harga yang dilaksanakan oleh pialang. Pialang boleh saja menjual atau membeli di luar harga yang dipesan oleh pemodal, asalkan lebih menguntungkan bagi pemodal.

Perorangan ataupun Badan Usaha dapat menjadi Perantara Perdagangan Efek. Badan usaha yang dimaksud bebas membentuk LKBB, Bank atau Badan hukum bentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak sebagai perantara perdagangan efek. Badan usaha dan peroran-

gan itu harus di Indonesia dan mempunyai tenaga ahli di bidang perdagangan efek. Untuk dapat beroperasi sebagai perantara perdagangan efek, harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

6. Pedagang Efek (Dealer)

Perubahan harga efek (saham, obligasi) di Bursa, yang kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, menarik perhatian kalangan pemodal untuk melakukan usaha jual beli efek. Pemodal yang melakukan usaha jual beli efek ini dinamakan pedagang efek. Pedagang efek termasuk pihak yang diperkenankan masuk ke lantai bursa untuk melakukan jual beli efek, termasuk melakukan jual beli efek atas namanya sendiri.

Berbeda dengan perantara perdagangan efek, bila harga-harga efek naik atau turun yang mendapat keuntungan atau menderita kerugian bukan perantara perdagangan efek, tetapi pemodal itu sendiri. Pedagang efek di pasar modal Indonesia dapat berfungsi ganda. Selain berfungsi sebagai pedagang, pedagang efek diperbolehkan juga bertindak sebagai perantara perdagangan efek. Dalam hal pedagang efek menjalankan kedua fungsi itu ia harus mengutamakan pemenuhan pesanan pemodal lain.

Keuntungan di pasar modal Indonesia sekarang hanya memperbolehkan lembaga-lembaga tertentu yang dapat menjadi pedagang efek. Lembaga-lembaga itu adalah: (1) Perantara pedagang efek yang telah menjadi anggota bursa; (2) Lembaga keuangan bukan bank dan bank; (3) Badan hukum berbentuk persoalan terbatas dan perorangan, (4) yang mendapat izin khusus untuk melakukan kegiatan perdagangan efek. Agar dapat ber-

tindak sebagai pedagang efek, lembaga-lembaga tersebut di atas harus memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

7. Perusahaan Surat Berharga (*Securities Company*)

Perusahaan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek. Perusahaan surat berharga terjemahan bebas dari *securities company*. *Securities Company* bisa dikatakan sebagai bentuk raksasa dari pedagang efek itu.

Terdapat banyak kegiatan yang tercakup dalam kegiatan *Securities Company*. Tidak saja perdagangan efek, tetapi juga meliputi kegiatan *underwriter*, perantara perdagangan efek dan penyedia jasa pengelola dan (*fund management*) dapat dilakukan oleh *securities company*. Untuk berperan sebagai *underwriter*, *securities company* dituntut mempunyai tenaga profesional di bidang itu. Sedangkan untuk kegiatan perantara perdagangan efek dan perdagangan (broker dan dealer) ia juga harus mempunyai tenaga ahli tersendiri, yang berbeda dengan kualitas *underwriter*. Dalam hal memberikan jasa pengelolaan dana, berarti ia akan dikontrak oleh pemodal besar untuk mengelola dana yang ditanamkan dalam efek-efek.

Dengan adanya *securities company* potensi penyerapan dana emisi menjadi kuat, keaktifan perdagangan di pasar sekunder akan meningkat. Demikian pula kemampuan lembaga *underwriter* membentuk sindikat semakin kuat, sehingga memungkinkan posisi *underwriter* secara keseluruhan menjadi kuat untuk menampung keinginan perusahaan yang akan *go public*.

8. Perusahaan Pengelola Dana (*Investmen Company*)

Perusahaan Pengelola Dana (*Investmen Company*) adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpanan dana.

Investmen Company atau Perusahaan Pengelola Dana akan berbuat banyak bagi pemodal yang ingin terima jadi saja hasil investasi di pasar modal. Jika pemodal merasa tidak mampu untuk menghitung sendiri resiko yang dihadapi dan ingin berinvestasi dalam efek-efek, percayakan keinginan itu kepada perusahaan pengelola dana.

Bagi perusahaan pengelola dana, selain bermodalkan uang, hal yang paling penting bagi mereka adalah bermodalkan keahlian. Keahlian khusus dalam mengelola dana yang ditanamkan dalam efek-efek. Pemodal mempercayai dananya pada perusahaan pengelola dana karena percaya kepada keahlian dan profesionalismenya. Dalam melaksanakan kegiatannya organisasi perusahaan pengelola dana mempunyai dua unit yang paling utama, yakni pengelola dana (*fund management*) dan penyimpanan dana (*quetodion*). Unit pengelola dana harus memahami betul “pencak silat”nya efek-efek. Unit inilah yang menentukan saham-saham apa yang harus dibeli dan saham apa yang harus dijual supaya memperoleh keuntungan atau paling jeleknya mengurangi kerugian.

9. Kantor (Biro) Administrasi Efek

Kantor (Biro) Administrasi Efek adalah kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rang-

ka memperlancar administrasinya. Setelah melakukan emisi, perusahaan akan menghadapi kegiatan yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum ia menjadi perusahaan *go public*. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan *go public* yang diambil oleh perusahaan.

Sebelum *go public*, boleh dikatakan sangat jarang terjadi perubahan pemegang saham. Pemegang saham terbatas dan mudah dikenal sehingga penyampaian sesuatu yang bersifat administrasi atau dividen kepada pemegang saham tidak menemui kesukaran. Setelah perusahaan melakukan *go public* perubahan pemegang saham sering sekali, lebih-lebih lagi bagi perusahaan yang mengalami transaksi sahamnya di Bursa. Pada pemegang sahamnya tersebar di mana-mana, sampai di luar negeri. Pemegang saham itu harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya, termasuk dicatat dalam Buku Daftar pemegang saham.

Bila terjadi perubahan pemegang saham, sangat boleh jadi Direksi maupun Komisaris perusahaan tidak lagi mengenal setiap pemegang saham, dari pihak pemodal pun, bila sudah terlibat secara sungguh-sungguh di pasar modal ia harus menekuni betul setiap jenis saham yang dimilikinya, termasuk mencatat dan menyimpannya dengan baik. Bila memiliki banyak saham baik dari jumlah maupun jenisnya, maka untuk melakukan administrasinya memerlukan waktu dan perhatian khusus.

Sebagai dampak dari semakin banyaknya pekerjaan yang akan dilakukan oleh emiten maupun pemodal dalam rangka penerbitan dan pemilikannya saham itu, mendorong emiten dan pemodal untuk memiliki unit khusus yang menangani kegiatan-kegiatan tersebut.

Pertimbangan lebih lanjut adalah, apabila mengadakan khusus jangan sampai menimbulkan biaya yang relatif besar, sehingga tidak mengurangi keuntungan emiten atau pemodal. Untuk memenuhi kondisi tersebut, maka berdirilah “kantor (biro) administrasi efek” untuk melaksanakan aktivitas yang diminta oleh emiten maupun pemodal. Adapun kegiatan kantor administrasi efek antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu emiten dan penjamin emisi dalam rangka emisi efek. Bantuan ini dapat dalam bentuk misalnya mencetakkan sertifikat saham emiten, atau mencatat permohonan pembelian efek pada pasar perdana dan lain-lain.
- b. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para pemodal, Pemodal dapat menitipkan sahamnya di kantor administrasi milik pemodal, maka kantor administrasi efek akan melakukan pengalihan dan memindahbukukan atas saham-saham yang telah dijual/dibeli tersebut.
- c. Menyusun Daftar Pemegang Saham dan perubahannya untuk melakukan pembukuan pemegang saham (pembuatan daftar pemegang saham) dapat diserahkan oleh emiten kepada kantor administrasi efek.
- d. Menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham misalnya menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk pemberitahuan pembayaran deviden. Semua itu dilakukan atas nama emiten.
- e. Membuat laporan-raport bila diminta oleh instansi berwenang, seperti OJK dan Menteri Keuangan.

10. Profesi Penunjang Pasar Modal

Terdapat beberapa profesi penunjang pasar modal yang meliputi:

- a. Akuntan Publik, yakni pihak yang menjamin bahwa laporan keuangan emiten sesuai dengan norma dan prinsip akuntansi yang berlaku.
- b. Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akte anggaran dasar atau akte perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek.
- c. Penilai, yaitu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan.
- d. Konsultan hukum, yaitu pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan emiten.

F. Instrumen Pasar Modal Syariah

Sebagai sebuah pasar, tentu terdapat penjual dan pembeli serta produk yang diperjualbelikan pada tingkat harga tertentu. Di pasar modal terdapat beberapa produk atau instrumen yang diperjualbelikan yakni sebagai berikut:

1. Saham

a. Pengertian Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, nilai

saham terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1) Nilai Normal

Merupakan nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan, di Indonesia saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai nominal.

2) Nilai Dasar

Pada prinsip harga dasar saham ditentukan dari harga perdana saat saham tersebut diterbitkan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham, antara lain: *Right Issue*, *Stock Split*, *Waran*, dan sebagainya.

3) Nilai Pasar

Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika bursa sudah tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga penutupnya.

b. Jenis-jenis Saham

Berdasarkan cara peralihannya, saham dapat dibedakan menjadi dua yakni Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*) dan Saham Atas Nama (*Registered Stock*).

1) Saham atas unjuk (*Bearer Stock*), adalah saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.

2) Saham atas nama (*Registered Stock*), adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu,

yaitu dengan dokumen peralihan dan nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut dengan mudah mendapat pergantiannya.

Untuk mempermudah dalam membedakan antara saham atas unjuk dan saham atas nama, perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 5.2. Perbedaan *Bearer Stock* dan *Registered Stock*

Saham atas unjuk Bearer Stock	Sahan atas nama Registered Stock
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur perdagangan mudah dan cepat. 2. Tidak perlu daftar pemilik saham. 3. Sulit diketahui dan mudah dipantau. 4. Sulit diganti jika terjadi kehilangan. 5. Lebih mudah dipalsukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur perdagangan perlu waktu, karena perlu perpindahan nama kepemilikan (Registrasi). 2. Harus ada pihak yang mencatat nama atau daftar pemilik saham. 3. Nama pemilik saham mudah diketahui dan mudah dipantau. 4. Kalau hilang mudah diganti. 5. Lebih sulit dipalsukan.

Selain terdapat saham atas unjuk dan saham atas nama di atas, berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegangnya, saham dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1) Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Dalam prakteknya, hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan kepada pemilik saham preferen dibanding kepada pemilik saham biasa. Begitu pula hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi. Saham biasa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi.
- b. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Perdagangan Saham.
- c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Hak tanggung jawab yang terbatas.
- e. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.

2) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen adalah saham gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini sering disebut dengan sekuritas campuran. Saham preferen sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mewakili kepemilikan dari modal. Di lain pihak saham preferen sama dengan obligasi karena jumlah devidennya

tetap selama masa berlaku dari saham, memiliki klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki hak tebus, dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Pemilik saham preferen akan memperoleh hak utama terhadap dividen dan harta jika perusahaan dilikuidasi. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap.
2. Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi.
3. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

c. Manfaat Memiliki Saham

1) Dividen

Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terdapat beberapa jenis dividen sebagai berikut:

- Dividen Tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki.
- Dividen Saham, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham.

2) **Capital Gain**

Capital Gain adalah selisih positif harga beli dan harga jual saham. Investor dapat menikmati *capital gain*, jika harga jual melebihi harga beli saham tersebut.

d. Risiko Memiliki Saham

1) Tidak ada pembagian dividen

Jika emiten tidak dapat membentuk laba pada tahun berjalan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha.

2) *Capital Loss*

Capital loss adalah selisih negatif antara harga beli dengan harga jual. Investor akan mengalami *capital loss*, jika harga beli saham lebih besar dari harga jual.

3) Risiko Likuidasi

Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar.

4) Saham Delisting dari Bursa

Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya (*delisting*) di Bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan.

2. Obligasi

a. Pengertian Obligasi

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Keuntungan dari membeli obligasi akan diwujudkan dalam bentuk kupon, berbeda dengan saham dalam obligasi pemiliknya tidak memiliki hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan.

b. Jenis-jenis Obligasi

Obligasi yang dikeluarkan emiten beragam tergantung keinginan dari para emiten itu sendiri, ditinjau dari segi peralihan obligasi dapat dibedakan menjadi:

1) Obligasi atas unjuk (*bearer bonds*)

Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

2) Obligasi atas nama (*registered bonds*)

Obligasi yang mencantumkan nama pemilik dan untuk pengalihannya memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur tertentu.

Selain kedua jenis obligasi di atas, ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau klaim, maka obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan.

- 1) Obligasi dengan jaminan (*secured bonds*)
Merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu, berdasarkan jaminannya terdiri atas obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan.
- 2) Obligasi tanpa jaminan (*unsecured bonds*)
Tanpa jaminan dapat diartikan bahwa obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya 7 tahun, 10 tahun dan seterusnya.
- 2) Nilai pokok utang. Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya PT. AZZAMY menerbitkan obligasi sebesar 200 Milyar. Umumnya, obligasi memiliki pecahan sebesar Rp. 50 Jutaan.
- 3) Kupon obligasi. Pendapatan utama pemilik obligasi adalah berupa bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya dibayar setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Dalam obligasi, istilah bunga umumnya disebut dengan kupon.

- 4) Peringkat obligasi. Tingkat kemampuan membayar utang dan kupon obligasi dari sebuah perusahaan disebut peringkat obligasi. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Dengan adanya peringkat tersebut investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar resiko yang akan dihadapi jika membeli obligasi tertentu.

Dari segi tingkat suku bunga atau kupon yang ditawarkan, obligasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) *Fixed rate*, yaitu obligasi yang memberikan kupon dengan presentase yang tetap. Misalnya obligasi X diterbitkan dengan tingkat kupon *fixed rate* sebesar 15 % per tahun selama 7 tahun. Artinya pemegang obligasi akan menerima kupon yang tetap selama masa berlaku obligasi tersebut.
- 2) *Floating rate*, yaitu obligasi yang besarnya kupon tidak dipatok tetap, melainkan berdasarkan ukuran tertentu. Misalnya obligasi B, diterbitkan selama 5 tahun dengan kupon 2 % di atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Artinya selama 5 tahun pemegang obligasi akan menikmati return sebesar 2 persen di atas tingkat suku bunga SBI. Jadi besarnya kupon tergantung perkembangan tingkat suku bunga SBI selama 5 tahun tersebut.

3. Manfaat Memiliki Obligasi

Apakah Anda tertarik untuk memiliki obligasi? Sebelum melakukan pembelian obligasi, tentu harus tahu manfaat yang dapat diperoleh jika Anda memiliki obligasi, diantaranya:

a. Bunga

Bunga dibayar secara regular sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal.

b. Capital Gain

Sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di Pasar Sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh *Capital Gain* juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya, kemudian pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal.

c. Hak klaim pertama

Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan.

d. Konversi

Investor dapat mengkonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan, dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham.

4. Risiko Memiliki Obligasi

a. Gagal bayar (*default*)

Gagal bayar maksudnya adalah kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta

hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi.

b. *Capital Loss*

Capital loss akan terjadi jika obligasi dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.

c. *Callability*

Sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah ditentukan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Jadi pemegang obligasi yang memiliki persyaratan *callability* berpotensi merugi, apabila suku bunga menunjukkan kecenderungan menurun, untuk mengkompensasi kerugian tersebut emiten akan memberikan premium.

5. Produk Derivatif

Apakah di pasar modal hanya diperjualbelikan saham dan obligasi? Selain saham dan obligasi, di pasar modal dipasarkan pula produk derivatif. Derivatif terdiri atas efek yang diturunkan dari instrument efek lain yang disebut “underlying”. Ada beberapa macam instrumen derivatif dalam pasar modal di Indonesia, seperti Bukti Right, Waran, dan Kontrak Berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat beresiko jika tidak dipergunakan secara hati-hati.

a. Bukti Right (*Ringht Issue*)

1) Pengertian Bukti Right

Bukti Right didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah

ditetapkan selama periode tertentu. Bukti Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Right juga dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder selama periode tertentu.

2) Manfaat Memiliki Bukti Right

- a) Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan Bukti Right yang dimilikinya. Hal tersebut memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham baru dengan harga yang murah.
- b) Bukti Right dapat diperdagangkan pada Pasar Sekunder, sehingga investor dapat memiliki *capital gain*, ketika harga jual dari Bukti Right tersebut lebih besar dari harga belinya.

3) Resiko Memiliki Bukti Right

- a) Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaan, maka investor tidak akan mengkonversikan Bukti Right tersebut, sementara itu investor akan mengalami kerugian atas harga beli Right.
- b) Bukti Right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor dapat mengalami *capital loss*, ketika harga jual dari Bukti Right tersebut lebih rendah dari harga belinya.

b. Warrant

1) Pengertian Warrant

Warrant biasanya melekat sebagai daya tarik (*sweetener*) pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, Warrant dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan Warrant lebih lama dari pada bukti right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun.

2) Manfaat Memiliki Warrant

- a) Pemilik Warrant memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di Pasar Sekunder dengan cara menukarkan Warrant yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan.
- b) Apabila Warrant diperdagangkan di Bursa, maka pemilik Warrant mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*) yaitu apabila harga jual Warrant tersebut lebih besar dari harga beli.

3) Resiko Memiliki Warrant

- a) Jika harga saham pada periode pelaksanaan (*exercise periode*) jatuh dan menjadi rendah dari harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukarkan Warrant yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli Warrant tersebut.

- b) Karena sifat Warrant hampir sama dengan saham dan diperdagangkan di bursa, maka pemilik Warrant juga dapat mengalami kerugian (*capital loss*) jika harga beli Warrant lebih tinggi daripada harga jualnya.

c. Kontrak Berjangka Indeks Saham (KBIS)

1) Pengertian KBIS

KBIS adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Obyek yang dipertukarkan disebut “*Underlying Asset*”. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebelum membuka kontrak harus menyetorkan margin awal, dan karena kontrak tersebut memiliki waktu yang terbatas, maka pada saat jatuh tempo posisi kontrak harus ditutup pada berapapun harga yang terjadi bursa. Margin itu sendiri harus berada pada suatu level harga tertentu dan jika margin tersebut turun di bawah level tersebut, yang biasanya diakibatkan kerugian yang sangat besar, lembaga kliring akan meminta investor untuk menambah dana kembali.

2) Manfaat Memiliki KBIS

- **Spekulasi**

Investor dapat berspekulasi dengan melakukan perdagangan indeks berjangka daripada melakukan transaksi untuk saham, hal tersebut dimungkinkan karena adanya “le-

verage". Dengan "leverage" investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga dengan modal yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan jika melakukan transaksi perdagangan masing-masing saham di atas.

- **Arbitrase**

Dengan arbitrase, investor dapat memperoleh keuntungan dari perbegaan antara harga di pasar spot dan pasar berjangka.

- **Hedging**

Pemilik KBIS dapat menghindari risiko kerugian dengan menjual KBIS sebelum jatuh temponya dengan taksiran harga yang memberikan keuntungan.

3) Risiko Memiliki KBIS

- Pada saat jatuh tempo, investor harus menutup/menyelesaikan posisinya, walaupun harga yang terjadi berbeda dengan harapannya, sehingga investor dapat mengalami kerugian yang sangat besar jika dibandingkan dengan modal awal.
- Apabila investor mengalami kerugian yang besar, maka ia diharuskan untuk menyeter tambahan dana ke lembaga kliring.

6. Reksa Dana

a. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio

efek oleh manajer investasi.

b. Jenis Reksa Dana

Reksa Dana dapat diklasifikasikan menjadi empat katagori berdasarkan investasinya, yaitu Reaksi Dana Saham, Obligasi, Pasar Uang, dan Reaksi Dana Campuran. Investor dapat memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan tujuan investasinya.

- 1) **Reaksi Dana Saham:** Merupakan Reaksi Dana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham emiten. Jenis ini memberikan potensi risiko yang besar serta tingkat pengembalian (*return*) yang besar pula, atau “*big risks big returns*”.
- 2) **Reaksi Dana Obligasi:** Bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan yang ingin memperoleh pendapatan yang dapat diprediksi serta stabil, jenis Reaksi Dana ini merupakan instrument yang perlu dipertimbangkan, meningkat jenis ini memberikan tingkat pengembalian serta risiko yang moderat.
- 3) **Reaksi Dana Pasar Uang:** Reaksi Dana ini memberikan tingkat risiko dan pengembalian yang rendah.
- 4) **Reaksi Dana Campuran:** Merupakan Reaksi Dana dari berbagai macam Efek. Alokasi aktiva di distribusikan pada investasi saham untuk tujuan pertumbuhan, obligasi untuk pendapatan, pasar uang untuk tunai dan stabilitas.

c. Katagori Reksa Dana

1) **Reksa Dana Terbuka (*Open-end*)**

Reksa dana ini dimaksudkan bahwa Manager Investasi selalu siap untuk membeli kembali

atau menembus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya, sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham atau per unit. Nilai Aktiva Bersih (NAB) = Nilai pasar aktiva Reksa Dana (sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan) – total kewajiban.

$$\text{Nilai per Saham atau per unit Saham} = \frac{\text{NAB}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

2) Reksa Dana Tertutup (*Closed-end*)

Pada Reksa Dana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat langsung menjualnya ke Bursa. Harga yang terbentuk di Bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi.

d. Manfaat Memiliki Reksa Dana

- 1) Tingkat pengembalian yang potensial
Tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari investasi pada Reksa Dana adalah Dividen yang dapat diterima dari manajer investasi dan keuntungan atau *Capital Gain* dari peningkatan Nilai Aktiva Bersih.
- 2) Diversifikasi
Suatu portofolio Reksa Dana terdiri dari berbagai macam Efek yang dapat dimiliki oleh investor dengan biaya yang relative sedikit.
- 3) Pengelolaan secara profesional
Investor tidak perlu melakukan analisa efek karena tugas tersebut sudah dilakukan oleh manajer investasi yang profesional.

4) Likuiditas

Reksa Dana Terbuka sangat likuid karena investor dapat menjual unit miliknya kapan saja kepada Manajer Investasi.

e. Risiko Memiliki Reksa Dana

1) Kerugian yang potensial

Selain Reksa Dana, Pasar Uang memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang kecil. Tipe Reksa Dana yang lain lebih rentan terhadap risiko.

2) Risiko Likuidasi

Untuk Reksa Dana Tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja ia inginkan, karena penjualannya harus dilakukan di Bursa yang tergantung pada permintaan serta penawaran yang ada

Khusus untuk pasar modal syariah, instrumen yang diperjualbelikan adalah efek syariah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian awal bab ini bahwa efek syariah adalah efek yang akad, manajemen emiten, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran Islam sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten dalam praktik pasar modal syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan den-

gan prinsip-prinsip syariah. Praktik transaksinya tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *dharar*, maksiat dan kedzaliman.

2. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad syariah yang dapat digunakan diantaranya *ijarah*, *kafalah*, *mudharabah*, dan *wakalah*.
3. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO) yaitu pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang sudah mendapat sertifikat dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
4. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menghindari jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti jenis usaha sebagai berikut:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan baik bank maupun IKNB konvensional yang mengandung unsur *riba* *bi*.
 - c. Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman haram.
 - d. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Efek-efek syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, kontrak investasi kolek-

tif efek beragun aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan tentang obligasi syariah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 33 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 59 tahun 2007 tentang obligasi syariah *mudharabah* konversi. Adapun untuk Reksa dana syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001.

Selain saham, obligasi dan Reksa dana syariah, adapula Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah yang ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 65 tahun 2008 dan Waran Syariah yang ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 66 tahun 2008. Khusus untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) sebagai pihak yang menyediakan sarana transaksi pasar modal di Indonesia memiliki Jakarta Islamic Indeks (JII). Penentuan kriteria pemilihan efek syariah dalam JII melibatkan BEI dan Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management (DIM).

Rangkuman (*Summary*)

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal mengartikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
- Efek adalah surat berharga jangka panjang, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
- Terdapat empat fungsi pasar modal yaitu fungsi ekonomi, fungsi keuangan, fungsi tabungan dan fungsi likuiditas
- Pasar Perdana disebut juga dengan *Initial Public Offering (IPO)* yaitu pasar tempat perusahaan atau *emiten* pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum (*publik*).
- Pasar Sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau setelah pasar perdana, perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor lainnya, transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal.
- Lembaga penunjang pasar modal diantaranya: bursa efek, penanggung, penjamin emisi, wali amanah, pialang, broker, dealer, perusahaan pengelola dana, perusahaan surat berharga, kantor administrasi efek
- Instrumen pasar modal terdiri atas saham, obligasi, reksa dana dan produk derivatif.

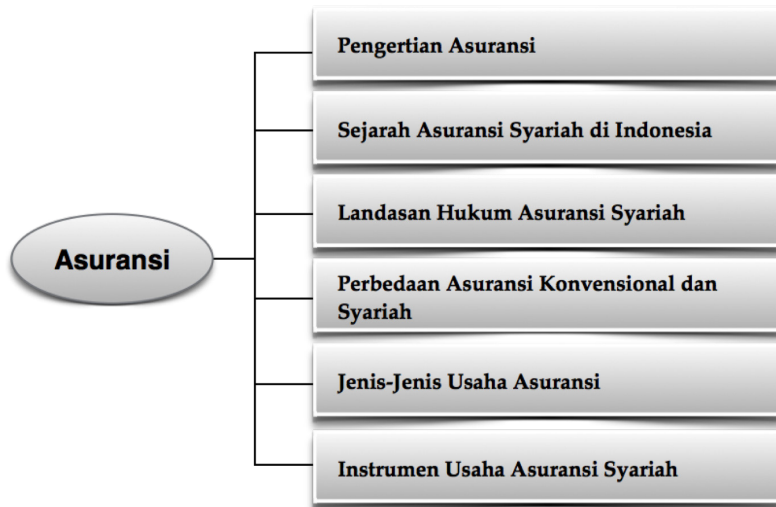
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website www.idx.co.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta.

Bab 6

Asuransi Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Asuransi, perasuransian, reasuransi, premi, resiko, *tabarru'*

A. Pengertian

Secara Bahasa, asuransi berasal dari kata *insurance* atau *assurance* (Inggris), *assurantie* (Belanda) *takaful, a-ta'min* (Arab) yang berarti jaminan atau pertanggungan dan atau saling memikul. Sedangkan menurut Istilah, Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa asuransi adalah:

“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima prem, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Adapun menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan *at-ta'min*, *takafful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah Fatwa DSN No. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah (Kitab Undang-Undang Ekonomi Syari'ah, 2011). Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat (Kitab Undang-undang Ekonomi Syari'ah, 2011).

B. Sejarah Asuransi Syari'ah di Indonesia

Sebelum berdirinya Asuransi Takaful di Indonesia, asuransi takaful sudah lahir di berbagai Negara, baik di negara muslim maupun non muslim, diantaranya: 1) Pada tahun 1979, Islamic Insurance Co. Ltd berdiri di Sudan; 2) Islamic Insurance Co. Ltd di Arab Saudi (1979). 3) Pada tahun 1983, berdiri Dar al-mal al-Islami di Genewa Swis dan Takaful Islam di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan at-Takaful al-Islami di Bahrian. Adapun di Negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, yakni Malaysia, telah berdiri Syarikat Takaful Sendirian Berhad pada tahun 1984 (Muhammad, 2000).

Di Indonesia, gagasan untuk mendirikan asuransi Islam sudah muncul sejak lama, dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perusahaan perasuransian syari'ah di Indonesia lahir beberapa tahun setelah perbankan syari'ah lahir, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1994 berdiri Asuransi Takaful Indonesia, dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Dalam pendirian tersebut diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang

dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan RI, dan para Pengusaha Muslim Indonesia (Abdul Aziz dkk, 2010).

Dalam perkembangannya, melalui berbagai seminar nasional dan studi lanjut ke berbagai negara yang terlebih dahulu telah melahirkan asuransi syari'ah, seperti Malaysia, akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia (PT. STI) sebagai *holding company*. Kemudian PT. STI mendirikan dua anak perusahaan, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (*life insurance*) dan PT. Asuransi Takaful Umum (*General Insurance*). PT. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Mar'ie Muhammad.

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang bergerak di perasuransian mulai lahir dan tumbuh berkembang, seperti PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah (1997), MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastrn (2001), Asuranasi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Bumida 92003, Asuransi Binagria (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004).

Dewasa ini, beberapa perusahaan asuransi multinasional sudah menempati beberapa cabang di berbagai Provinsi di Indonesia, seperti Allianz dengan Alisya-nya, Prudential dengan Prusya-nya, Asuransi Tokio Marine Syari'ah, dan lain-lain.

C. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Islam senantiasa memberikan jaminan kepada umatnya dan orang-orang yang bernaung di bawah naungan kekuasaannya. Jaminan itu bisa melalui solidaritas sosial di antara umat Islam, dan bisa pula lewat pemerintah serta *baitul maal*.

Berikut merupakan landasan hukum asuransi syariah dalam Islam:

1. Landasan Al-Quran

a. QS. Al-Maidah ayat: 2

و...تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sik-sanya".

b. QS. Al-Baqarah ayat: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."

c. QS. Al-Baqarah ayat: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir

benih, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui”.

d. QS Al-Taghaabun ayat: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

e. QS Al-Hijr ayat: 20

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya: “dan kami telah menjadikan untukmu di bumi, keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya.”

2. Landasan Hadits

a. HR. Bukhari Muslim dari Nu'man bin Basyir

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota badan itu sakit, maka seluruh badan merasakannya”

b. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari

“Artinya: seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”

3. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Andri Soemitra (2009) menjelaskan, bahwa peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indo-

nesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).

Adapun asuransi syariah, regulasi yang mengaturnya masih terbatas bahkan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/

III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi.

D. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Hal tersebut membentuk karakteristik asuransi syariah menjadi sesuatu yang unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
2. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (*Mudharabah*), bersih dari *gharar*, *maysir* dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
3. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah.

4. Akad pada asuransi syariah adalah akad *Tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilaksanakan atas dasar tolong-menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan jual-beli (*tabadduli*).
5. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing periode*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagai dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).
6. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *Tabarru* (dana kebijakan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
8. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak.

9. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*), sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).
10. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis* yang mengakui apa yang telah ada sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi *accrual basis* yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada (padahal belum tentu terealisasi).

Islam tidak melarang asuransi selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun dalam perkembangannya, asuransi konvensional yang lebih dulu ada terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Islam itu sendiri. Oleh karena itu, lahirnya beberapa perusahaan asuransi syariah sekurang-kurangnya didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung beberapa kelemahan dari perspektif syariah. Menurut Djaslim Saladin (2000), terdapat beberapa kelemahan asuransi konvensional yang menjadi bagian dari faktor pemicu lahirnya asuransi syariah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya unsur ketidakpastian (*Gharar*)

Gharar itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara pihak

tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan asuransi akan untung dan pihak tertanggung merasa rugi secara finansial.

2. Adanya Unsur Judi (*Maisir*)

Adanya *maisir* dalam asuransi konvensional karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan dari mana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungsannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil resiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut *maisir* di sini adalah jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

3. Adanya Unsur Riba

Adapun unsur riba dalam asuransi konvensional, diantaranya menginvestasikan semua dananya dengan bunga. Hal tersebut dilakukan pada saat perhitungan kepada peserta dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan.

E. Jenis-Jenis Usaha Asuransi

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 3 bahwa jenis usaha perasuransian dan usaha penunjangnya sebagai berikut:

1. Usaha asuransi terdiri dari:
 - a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
 - c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Usaha penunjang asuransi terdiri dari:
 - a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
 - c. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
 - d. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

- e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Perusahaan yang melaksanakan asuransi dikenal dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perusahaan ini mendapatkan dana dan akan dipergunakan untuk membayar ganti rugi di kemudian hari. Dana yang diperoleh perusahaan asuransi lebih dikenal dengan istilah premi asuransi. Padahal premi asuransi yang dibayarkan oleh pembeli asuransi merupakan hasil jumlah premi untuk resiko dan biaya operasional. Premi asuransi untuk resiko ini yang harus diinvestasikan perusahaan asuransi untuk digunakan membayar ganti rugi di masa mendatang. Investasi perusahaan asuransi harus dapat menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan perjanjian. Oleh karenanya, Menteri Keuangan melalui OJK harus mengawasi investasi perusahaan asuransi agar pembeli asuransi bisa mendapatkan yang dijanjikan di dalam kontrak.

F. Instrumen Usaha Asuransi Syariah

Instrumen usaha asuransi yang diizinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 pasal 8 sebagai berikut:

1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito.
2. Saham, Obligasi dan surat Berharga lain yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Surat Berharga Pasar Utang(SBUP).
5. Surat Pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

6. Penyertaan Langsung.
7. Bangunan, atau Tanah dan Bangunan untuk tujuan investasi.
8. Pinjaman Hipotik.
9. Pinjaman Polis.

Deposito, saham syariah, dan reksa dana syariah menjadi instrumen investasi favorit pilihan para pelaku usaha asuransi syariah. Data menunjukkan sebanyak Rp. 7,28 Triliun atau 74,44% dari total dana investasi asuransi dan reasuransi syariah yang mencapai Rp. 9,34 Triliun ditempatkan pada tiga jenis instrumen asuransi tersebut. Sementara itu, sebanyak Rp. 2,06 Triliun atau 25,56% lainnya terbagi ke dalam jenis-jenis investasi lainnya. Wakil Ketua Bidang Statistik Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Srikandi Utami menuturkan pemilihan jenis instrumen investasi oleh perusahaan asuransi syariah sangat tergantung pada jenis bisnis yang dikelola. Dia mencontohkan pada jenis asuransi jiwa syariah, jenis instrumen pasar modal banyak dipilih (dakwatuna.com, diunggah tanggal 02 April 2014).

Rangkuman (Summary)

- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
- Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah.
- Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta.
 - b. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (*Mudharabah*), bersih dari *gharar*, *maysir* dan *riba*.
 - c. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Akad pada asuransi syariah adalah akad *Tabarru'* (hibah).
 - e. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan.
 - f. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk*.
 - g. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis*.

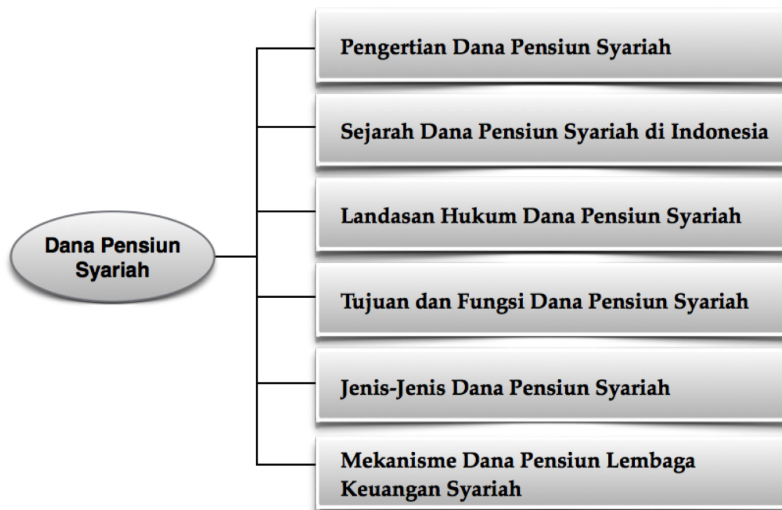
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website OJK, www.ojk.go.id, atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Perusahaan Asuransi terdekat.

Bab 7

Dana Pensiun Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK),

A. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) bahwa dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi.

Adapun David L. Scott (1988) mendefinisikan bahwa *"pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment; menurut FE Perry (1983) pension fund is an investment maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under the business or organization's pension scheme"*

Sedangkan Hermansyah (2009) mengartikan bahwa, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Badan hukum tersebut secara rutin mengumpulkan iuran pensiun dari pegawai yang menjadi pesertanya, kemudian membayarnya kembali saat pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi (pensiun).

Dana pensiun dapat diartikan juga sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun

dikelola dalam suatu lembaga yang disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut (Veithzal, Rivai dkk, 2007). Oleh karena itu, dana pensiun ini bukan hanya bersifat melindungi kekayaan nasabah tapi menjamin kontinuitas penghasilan dan kesejahteraan sewaktu nasabah tidak produktif lagi (Muhamad).

Sementara Andri Soemitra (2009) mengartikan bahwa, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.

B. Sejarah Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Untuk di Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober 1988, Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia memperoleh izin usaha mendirikan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA yang menggunakan merek dagang BRINGIN LIFE.

Pada tahun 1995, atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep – 184/KM. 17/1995 BRINGIN LIFE mendirikan Dana Pensiun Keuangan (DPLK) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua. BRINGIN LIFE mulai membuka unit usaha baru berupa Asuransi Syariah. Izin operasional Kantor Cabang (Kancab) syariah BRINGIN LIFE telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-007 / KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

C. Landasan Hukum Dana Pensiun

Landasan hukum dana pensiunan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Kementerian Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992).

Program lainnya dikenal dengan Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip

“kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko (Andri Soemitra, 2009).

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia (Maulana Farizil Qudsi, 2010).

D. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja (Perusahaan)
 - a. Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun (tidak produktif),
 - b. Loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap Perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - c. Kompetisi pasar tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
 - d. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan terhadap Perusahaan.
 - e. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di Perusahaannya.
 - f. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Karyawan/Peserta Dana Pensiun
 - a. Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
 - b. Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

3. Penyelenggara Dana Pensiun

- a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
- b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
- c. Sebagai bakti sosial terhadap karyawan atau peserta dana pensiun.

Adapun fungsi dana pensiun menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
- b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
- c. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

E. Jenis – Jenis Dana Pensiun

Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun Pasal 2 Bab II dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan

karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

Peraturan dana pensiun kerja menurut PP No. 76 Tahun 1992 terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama dana pensiun yang bersangkutan
- b. Nama Pendiri
- c. Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta
- d. Nama Mitra pendiri
- e. Tanggal pembentukan dana pensiun
- f. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja.
- g. Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun.
- h. Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta, pemberi kerja.
- i. Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan.
- j. Tata cara pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya
- k. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia.
- l. Tata cara perubahan peraturan dana pensiun dan tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran Pasti bagi perorangan. Baik karyawan, maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan, misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan yang bukan berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.

F. Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Dana Pensiun Syariah atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan salah satu jenis dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah, salah satu diantaranya adalah Dana Pensiun Bank Muamalat. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah.
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah.
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000
5. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri dan kartu keluarga.
6. Membayar biaya pendaftaran.
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

Produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Adapun karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.

3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
 - b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak sebagai berikut:

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun.
2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa, guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
8. Memperoleh manfaat pensiun.

Rangkuman (Summary)

- Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

- Fungsi dana pensiun adalah sebagai berikut:
 1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
 2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
 3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda / duda peserta.
- Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun Pasal 2 Bab II dapat digolongkan menjadi dua yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

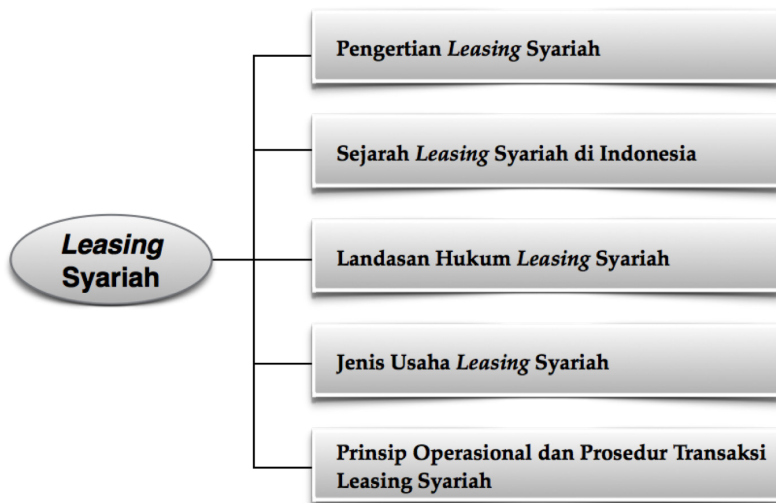
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Dana Pensiun terdekat.

Bab 8

Leasing Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

*Leasing Syariah, Al Ijarah, Al ijarah al muntahiyah bi al-tamlik.
Lessor, Lessee*

A. Pengertian

Menurut bahasa, *leasing* berarti “sewa guna usaha”. Berasal dari kata *lease* yang berarti menyewakan. Dalam syariah dikenal sebagai *Al Ijarah* yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al ‘iwadhu* (ganti). Secara umum, *leasing* artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut istilah, pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/11991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang diusahakan. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Adapun *lessor* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan *lessee* adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut (Kasmir, 2001).

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna

usaha bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di Perusahaan *leasing*. Perusahaan *leasing* dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri, keterbatasan leasing adalah tidak bolehnya melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang.

Adapun yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

B. Sejarah Leasing Syariah

Leasing (sewa guna usaha) pertama dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal dengan *al-ijarah*, berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank. Ada beberapa yang memang asli syariah, akan tetapi ada yang berupa unit usaha syariah. Dalam kehidupan perekonomian, tidak hanya dikenal perbankan syariah yang memang menjadi perhatian banyak orang. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas ten-

tang perbankan Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia.

Dengan perkembangan perbankan Islam, juga berkembang praktik ekonomi Islam yang lain, seperti leasing, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, lembaga zakat, koperasi dan lain sebagainya. Kemajuan ini menjadi sinyal positif untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan secara Islami, mengingat sebelumnya belum tersedia pelayanan dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Perekonomian yang islami perlu adanya instrumen yang menunjang, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan praktek ekonomi Islam di masyarakat cukup pesat sehingga perlu mendapatkan sebuah payung hukum dan aturan yang berfungsi untuk melindungi proses ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat (<http://leasingsyariahintan.blogspot.com/>).

C. Landasan Hukum Leasing Syariah

1. Al-Qur'an

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS.43:32)

"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.2:233)

2. Hadist

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”(HR.Bukhari dan Muslim)

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR.Ibnu Majah)

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” (HR. ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri)

“dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR.Nasa’i)

“Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya.”
(Hasan: Irwa-ul Ghalil No: 1489 dan Fathul Bari IV: 417 No: 2227).

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.” (HR Ahmad dari Ibnu Mas’ud).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang IJARAH (Berisi tentang Rukun dan Syarat Ijarah, Ketentuan Objek Ijarah, Kewajiban LKS dan Na-

sabah dalam Pembiayaan Ijarah).

- Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (Berisi tentang Rukun dan Syarat akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, Ketentuan, dan Hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan).

4. Peraturan Menteri Keuangan RI

Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor kep. 122/MK/IV/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.

D. Jenis Usaha Leasing Syari'ah

Sesuai dengan perkembangannya, sebagai lembaga penopang kebutuhan modal pembiayaan, maka lembaga *ijarah* atau *leasing* berkembang menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Financing Leasing* dan (2) *Operasional Leasing*.

1. Financing Leasing

Financing leasing adalah suatu bentuk cara pembiayaan, *lessor* yang mendapat hak milik atas barang yang dileasingkan menyerahkan kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Akad *leasing* ini mencakup beberapa tipe, yaitu: *sale type lease*; *direct financial lease*; *sale and lease back* dan *leverage lease*.

a. Sale Type Lease

Merupakan *financing lease*, tetapi *lease property* pada saat permulaan *lease* mempunyai nilai yang berbeda

dengan harga yang ditanggung oleh *lessor*. Dalam hal ini, *lessor* merupakan dealer atau pabrikan yang menggunakan leasing sebagai salah satu jalur pemasarannya. Dengan model ini transaksi yang dilakukan akan menghasilkan laba penjualan.

b. *Direct Financial Lease*

Merupakan salah satu bentuk dari *financial lease* yang dibiayai langsung oleh *lessor*. Metode ini sering disebut dengan *full fayout leasing*. *Lessor* membiayai sepenuhnya dari *leaser property* yang bersangkutan.

c. *Sale and Lease Back*

Merupakan model transaksi sewa dengan perjanjian *lessee* menjual barang yang sudah dimilikinya kepada *lessor*. Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, *lessor* me-lease-kannya kembali kepada *lessee* tadi. *Lessee* memerlukan atau melakukan ini karena *lessee* memerlukan tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.

d. *Leverage Lease*

Merupakan bentuk lain *leasing* yang lebih kompleks, sekurang-kurangnya tiga pihak yang berdiri sendiri. Jadi, di samping *leasor*, *lessee* ada pula *credit provider* atau *debt participant* yang membiayai sebagian besar *lease proerty* dalam *leverage lease*, *lessee* melakukan penawaran *equipment* menurut yang dikehendaki dan, melakukan penawaran harga, sama halnya dengan *nonleverage*. Tetapi *leasosor* hanya menanggung sebagian kecil dari pembiayaan *lease property*.

2. Operasional Leasing

Operational leasing atau *service leases* memberikan service baik mengenai bidang keuangan maupun mengenai pemeliharannya. Jadi pihak *lessor/muajjir* (perusahaan leasing) menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran *leasing*. Dalam *leasing* ini biasanya terdapat klausul yang memberikan hak kepada *lessee / musta'jir* (perusahaan pemakai / penyewa) untuk membatalkan perjanjian *leasing* dan mengembalikan peralatan (objek sewa / *ma'jur*) itu kepada *lessor* sebelum habis waktunya. Hal ini merupakan syarat yang penting bagi *lessee*, sehingga *lessee* dapat mengembalikan peralatan tersebut jika ada perkembangan teknologi baru yang menyebabkan peralatan tersebut menjadi usang.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian pemikir Islam modern menjadikan istilah *Ijarah dengan operating lease* sebagai istilah yang tidak ada bedanya sama sekali. Di samping itu, antara *leasing* dan *ijarah* (sewa-menyewa) sama-sama sebagai bentuk transaksi hanya untuk mengambil manfaat tanpa harus memiliki barang aset dengan memberikan sejumlah uang sewa, baik di awal maupun di akhir kontrak.

Dengan demikian: 1). Pada *financing leasing*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pada *operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-ijarah-kan. 2). Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal, melainkan hanya sebatas menyewa saja.

E. Prinsip Operasional dan Prosedur Transaksi *Leasing* Syariah

Prinsip usaha *leasing* syariah dapat dilakukan berdasarkan pada akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

1. *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan hukum akad ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

2. *Al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan hukum akad ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 27 tahun 2002 tentang *Al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Adapun prosedur transaksi yang dapat dilakukan dalam operasional *leasing* syariah adalah sebagai berikut:

1. *Lessee* menghubungi *supplier* barang tertentu untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang.
2. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk mem-

peroleh fasilitas suatu barang modal dimana *lessee* dapat meminta *lease quotation*. Pihak *lessor* kemudian meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee* serta meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah dianggap lengkap, maka pihak *lessor* mengirimkan *letter of offer* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal kepada *lessee*. Jika *lessee* setuju, maka *lessee* menandatangani dan mengembalikannya kepada *lessor*. Pihak *lessor* akan meneliti dan menganalisis informasi dan data yang diberikan dengan cara:

- a. Melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*).
 - b. Meneliti langsung ke lokasi *lessee* berada (*on the spot*).
 - c. Meneliti ke lokasi di mana *lessee* memiliki hubungan.
3. Jika permohonan *lessee* diterima, maka pihak *lessee* dan *lessor* bertemu untuk menandatangani perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh *lessee*.
 4. Pihak *lessor* yang melakukan pemesanan kepada *supplier* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh *lessee* dan membayar sesuai perjanjian.
 5. Pihak *supplier* mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran kepada *lessee*. Selanjutnya *lessee* menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang diserahkan kepada *supplier*.
 6. Penyerahan dokumen oleh *supplier* kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
 7. Pembayaran oleh *lessor* kepada *supplier*.
 8. Pembayaran angsuran secara berkala oleh *lessee* kepada

lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai.

Rangkuman (Summary)

- Sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/11991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- Sewa guna usaha (*leasing*) syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syari'ah, diantaranya dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- Sesuai dengan perkembangannya sebagai lembaga penopang kebutuhan modal pembiayaan, maka lembaga *ijarah* atau *leasing* berkembang menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Financing Leasing* dan (2) *Operasional Leasing*.
- Prinsip usaha *leasing* syariah dapat dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Refleksi (Reflection)

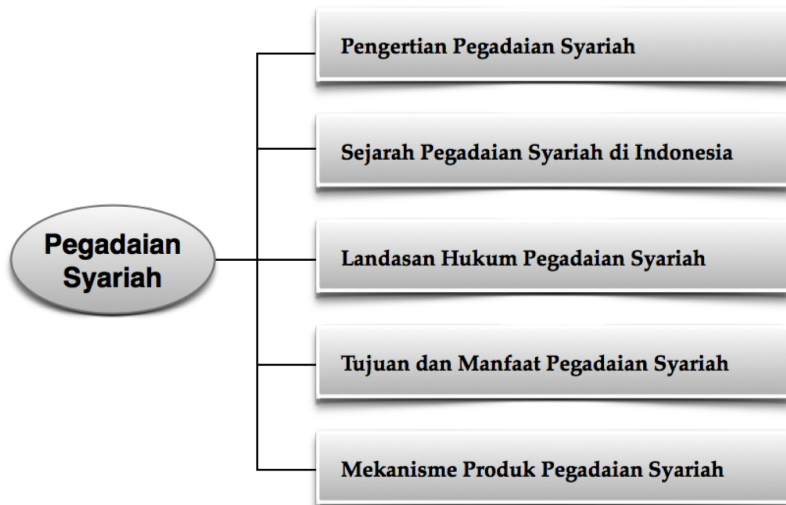
Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan. Bertanyalah

kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Leasing Syariah terdekat.

Bab 9

Pegadaian Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Pegadaian syariah, *ar-rahn*, *marhun bih*, *qardh*, gadai emas

A. Pengertian

Gadai atau dalam istilah syariah dikenal dengan *rahn*, secara etimologi berarti tetap berlangsung, menahan, kekal, dan jaminan yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata "*rahn*" yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si Peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Adapun gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Sedangkan pegadaian, menurut Susilo (1999), adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Adapun Veithza Rivai, dkk. (2007) memberikan benang merah bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

B. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia

Lahirnya pegadaian syariah di Indonesia seiring dengan terbitnya PP. Nomor 10 tanggal 1 April 1990 yang menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP. Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Ban-

yak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pengadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pengadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pengadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pengadain Syariah /Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) itu sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain Perum Pengadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional.

Pengadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) kemudian berkembang di kota-kota besar seperti; Semarang, Surabaya dan Bandung.

C. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Terdapat beberapa landasan hukum pegadaian syariah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2), ayat: 282-283

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pen-

ulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang”.

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia perbankan.

Dalam Q.S. An-Nisa, ayat: 29 Allah SWT berfirman:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadist.

Dari Aisyah r.a., Nabi SAW bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (H.R. Bukhri dan Muslim)

Dari Abi Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (H.R. As-Syafi’i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

3. Ijtihad Ulama.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad (Muham-

mad, 2000). Bagaimana mekanisme pegadaian menurut hukum Islam ini? Apakah yang sekarang ini berlaku di berbagai lembaga dan industri keuangan syariah ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam?

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN)

Di antara sekian fatwa yang ada, berikut beberapa fatwa yang menyinggung hal itu. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Gadai Emas. Secara umum menurut fatwa ini adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.

D. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

1. Tujuan Pegadaian

Tujuan dari pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bebas bunga.

2. Manfaat Pegadaian

Adapun manfaat pegadaian antara lain sebagai berikut:

a. Bagi nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan pegadaian

- 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh Peminjam dana.
- 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- 3) Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: Dana Pembangunan Semesta (55%), Cadangan Umum (20%), Cadangan Tujuan (5%), Dana Sosial (20%).

E. Mekanisme Produk Gadai Syariah

Menurut Andri Soemitra (2009), mekanisme yang dapat

dilakukan untuk setiap jenis produk gadai adalah sebagai berikut:

1. Produk Gadai (*Ar-Rahn*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- a) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
- b) Mengisi formulir permintaan *rahn*.
- c) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti: perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik.

Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- d) Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

2. Produk ARRUM

ARRUM merupakan singkatan dari *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Calon nasabah merupakan mikro kecil di mana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.

- b. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c. Calon nasabah harus melampirkan: Foto copy KTP dan kartu keluarga, Foto copy KTP suami/isteri, Foto copy surat nikah.

Foto copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari Kelurahan atau dinas terkait)

- 1) Asli BPKB kendaraan bermotor.
 - 2) Foto copy rekening koran / tabungan (jika ada).
 - 3) Foto copy pembayaran listrik atau telepon.
 - 4) Foto copy pembayaran PBB.
 - 5) Foto copy laporan keuangan usaha.
- d. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
- Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan :
- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM.
 - 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - 3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
 - 4) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 - 5) Penandatanganan akad pembiayaan.
 - 6) Pencairan pembiayaan.

3. Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan, dapat mendatangi bank-bank syariah yang me-

nyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Warga negara Indonesia (WNI).
- c. Cakap secara hukum.
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku).
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuknya dapat berupa emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi :

- a. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- b. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian, dan kadar karat jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- c. Jika menurut analisis, sang pemohon mendapatkan predikat layak, maka bank akan menerbitkan pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah

dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan standar emas.

- d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank.
- e. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
- f. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
- g. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses **kolektibilitas** tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan:
 - Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.
 - Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

Rangkuman (Summary)

- *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si Peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
- Usaha gadai memiliki ciri- ciri diantaranya:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
 3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
- Tujuan dari pegadaian adalah sebagai berikut:
 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bebas bunga.

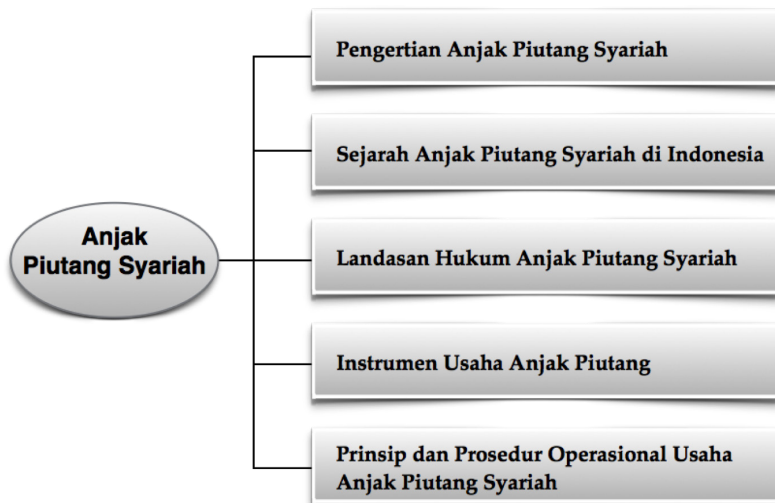
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan. Bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website OJK, www.ojk.go.id, atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Pegadaian Syariah terdekat.

Bab 10

Anjak Piutang (Factoring) Syariah

Peta Konsep (Concept Maps)



Kata Kunci (Key Words)

Anjak Piutang, *Hiwalah*, *Ujrah*, *Muhil*, *Muhal 'alaih*

A. Pengertian

Anjak piutang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *factoring* adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Terdapat tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. *Pertama*, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. *Kedua*, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang). *Ketiga*, pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang, diunggah 23 Mei 2014). Adapun istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk anjak piutang adalah *Hiwalah bil Ujrah*.

Prinsip *hawalah* yaitu pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Tagihan piutang dagang klien (yang biasanya UKM) langsung ditukarkan dengan prosentase tertentu dari nilai tagihan tersebut, katakanlah 80%. Saat tagihan tersebut telah jatuh tempo, bank akan menagihkannya ke pelanggan (biasanya perusahaan besar) yang berhutang pada klien tersebut, dan sisa tagihan yang belum diberikan kepada klien dikurangi dengan biaya administrasinya akan menjadi hak dari klien (kalau dalam anjak piutang konvensional, selain biaya administrasi klien harus membayar bunga atas uang muka yang diterimanya sampai terjadinya pelunasan tagihan). Jelas terlihat, bahwa pemberian dana talangan 80% tersebut akan sangat membantu likuiditas klien yang UKM tersebut.

Dengan menggunakan sistem upah (*Ujrah*), anjak piutang syariah boleh dilakukan karena tidak melanggar

ketentuan dalam Islam. Adapun ketentuan dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah memperoleh *ujrah* atas jasa yang diberikan oleh Bank Syariah (sebagai *muhil*) kepada nasabah (klien) dalam kedudukannya (sebagai *muhal 'alaih*) atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar utang nasabah.
2. Maksimum *ujrah* dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku atau yang disepakati kedua belah pihak.
3. Pembayaran *ujrah* dilakukan secara periodik maupun secara bersamaan saat nasabah melakukan pembayaran hutang kepada Bank Syariah, sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, anjak piutang dapat diartikan juga sebagai pengalihan serta pengurusan piutang kepada perusahaan anjak piutang sehingga penjual tidak perlu menagih langsung piutang kepada pembeli. Kas yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai modal kerja demi kesinambungan usaha walaupun penjual harus membayar biaya tertentu.

Adapun perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (Kasmir, 2010).

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbaharui dengan SK Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan atau pengurusan piutang atau penagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pernyataan ini dipertegas oleh SK Menteri Keuangan Nomor 172/ KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pengalihan dan pembelian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri ([http//sunarto.staff.gunadarma.ac.id](http://sunarto.staff.gunadarma.ac.id), diunggah 12 Mei 2014).

Sementara Richard Burton Simatupang mengartikan bahwa lembaga pembiayaan *factoring*/ anjak piutang adalah lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Berdasarkan beberapa pengertian anjak piutang di atas bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang adalah jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan atas piutang. Pada kenyataannya kedua jenis jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada pula yang hanya meliputi salah satu jenis jasa di atas. Pada dasarnya, pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antar pihak *factor* dan pihak klien.

B. Sejarah Anjak Piutang Syariah

Usaha jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan *factoring* sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, pertama kali digunakan di Mesopotamia. Pada awalnya, bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat sederhana. Pihak *factor*, biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai *general factoring*. *General factoring* ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris. Perusahaan *factor* di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang dari Plymouth (Amerika) untuk menjadi agen penjualan mereka di daratan Eropa, dan juga membelikan barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk di impor ke Amerika.

Revolusi industri pada akhir abad ke-18 turut mendorong pertumbuhan bisnis jasa *general factoring*. Mekanisasi alat-alat tenun tekstil di Inggris dan tingginya minat beli tekstil di Amerika telah menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor impor. Perkembangan bisnis tersebut, otomatis turut memacu pertumbuhan industri *factoring* di Amerika, terutama di New York City. Perusahaan *factoring* di Amerika saat itu seperti ketiban rezeki. Mereka menjadi agen produk tekstil Eropa atas dasar konsinyasi. Mereka juga memberikan kredit, menjamin kredit tersebut, memberikan pembayaran awal terhadap piutang yang timbul, dan melakukan penagihan untuk kepentingan kliennya, yaitu menjamin kredit, melakukan penagihan, dan penyediaan dana. Bentuk usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak piutang modern seperti yang dikenal saat ini. Anjak piutang modern ini kemudian terus berkembang tidak hanya di bidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke berbagai sektor

industri, baik untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi lokal.

Kegiatan anjak piutang mulai dikenal luas ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Pada waktu itu, sekitar tahun 1880-an, Amerika merupakan benua baru yang banyak didatangi dari benua Eropa terutama Inggris. Kedatangan bangsa Eropa mau tidak mau membawa konsekuensi bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi di daerah barunya, namun pada awalnya mereka tidak bisa banyak melakukan kegiatan produksi karena terbatasnya sumber daya manusia, modal dan peralatan. Keadaan ini memaksa mereka mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari daerah asal, yaitu Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di Inggris ingin memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang Amerika timbul masalah karena mereka tidak saling mengenal. Resiko tidak terbayarnya penjualan secara kredit semakin besar bukan saja karena mereka tidak saling mengenal tetapi juga karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di Inggris untuk menemukan solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai. Perusahaan-perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai perantara antara pihak penjual di Inggris dengan pembeli di Amerika, perusahaan-perusahaan ini selanjutnya mulai dikenal sebagai *factor* atau *agen*. Jasa yang ditawarkan oleh *factor* pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan pengalihan piutang saja.

Usaha *factor* ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan textile Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di Amerika. Mengingat *factor* ini dianggap sebagai perusahaan yang

cukup berpengalaman dalam berurusan dengan pembeli-pembeli di Amerika dan juga berpengalaman dalam hal penyelesaian tagihan piutang. Maka perusahaan textile di Inggris cenderung menggunakan jasa mereka untuk melakukan investigasi kredit kepada pembeli di Amerika. Tugas *factor* dalam hal ini adalah menentukan kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit (*credit worthiness*) dan juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya suatu piutang dari penjualan textile secara kredit. Lama kelamaan, *factor* tidak hanya memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli faktur-faktur penjualan textile dari perusahaan textile. *Factor* kemudian menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.

Dalam perkembangannya, kegiatan pemberian jasa anjak piutang ini tidak hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari kegiatan usahanya, tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang anjak piutang. Usaha mulai berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang kebagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula textile ke bidang-bidang lain termasuk jasa.

Bisnis anjak piutang modern ini akhirnya berkembang ke Eropa, terutama setelah berdirinya tiga grup anjak piutang internasional, yaitu:

1. Heller Overseas Corporation (Heller Group), dalam grup *factoring* ini, Heller berperan sebagai induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di Chicago.
2. International Factors Group (IFG), setiap grup ini tidak dikenal adanya induk perusahaan, setiap anggota bebas

satu sama lain tanpa adanya kaitan permodalan. Grup ini hanya menerima satu anggota dari setiap Negara, bermarkas di Brussel.

3. Factors Chain International, grup ini hampir sama dengan sistem IFG, yakni tanpa kaitan permodalan antara sesama anggotanya. Namun, grup ini dapat menerima lebih dari satu anggota dari setiap Negara, bermarkas di Amsterdam.

Ketiga grup *factoring* tersebut di atas sudah memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia, yaitu di negara negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Asean, termasuk Indonesia, Hong Kong, dan berbagai Negara lainnya.

Adapun untuk kawasan Asia Tenggara, anjak piutang pertama kali diperkenalkan di Singapura pada pertengahan tahun 70-an. Sejak saat itu, transaksi anjak piutang di Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik ditinjau dari jumlah perusahaan maupun turnover transaksinya. Sedangkan di Indonesiasia, kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 61 tahun 1988 (Paket Desember). Secara formal, pada awalnya, perkembangan usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu populer. Namun, kegiatan anjak piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yaitu kegiatan *Cheque Discounted* atau *Cheque* yang didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Kegiatan ini sudah berjalan secara informal di tengah masyarakat dan sudah baku di antara para pedagang di pasar pasar. Biasanya para pedagang menukar

Cek Mundur kepada penyedia dana, dan langsung dipotong dalam jumlah/persentase tertentu sesuai dengan jangka waktunya. Apabila Cek itu tidak ada dananya, maka penjual Cek harus mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana.

Lahirnya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan usaha pemerintah untuk memformalkan kegiatan anjak piutang yang sudah ada di masyarakat serta menjadikan usaha anjak piutang menjadi suatu bagian dari Lembaga Pembiayaan yang juga dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Kegiatan anjak piutang di Indonesia berkembang baik sejak adanya Keputusan Presiden No. 61 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Peraturan ini terutama untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak bersumber dari lembaga keuangan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan sebagai salah satu kegiatan usahanya, dan diberikan oleh suatu bank, dan dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang.

Salah satu bentuk perjanjian dan kontrak perjanjian yang belum diatur dalam BW (KUHPerdara) namun kenyataannya ada dan berkembang dalam masyarakat adalah pembiayaan konsumen (Hukum Perjanjian, 1992). Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya.

Dengan kemajuan kegiatan bisnis, terutama sejak orde reformasi, telah tumbuh lembaga bisnis yang berkaitan dengan lembaga *cessie*, yakni lembaga anjak piutang (*factoring*) atau *hiwalah* (*arab*). Lembaga anjak piutang menjadi salah satu upaya pembiayaan jangka pendek untuk transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

C. Landasan Hukum Anjak Piutang Syariah

Landasan hukum yang ada di Indonesia mengenai anjak piutang diantaranya sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 dikenal dengan paket deregulasi Desember 1988, yang memperkenalkan Industri *Multi Finance* di Indonesia, di mana pada waktu itu jasa pembiayaan yang baru dikenal oleh masyarakat adalah *Leasing* (Sewa Guna Usaha) saja melainkan adanya anjak piutang.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober tentang Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 Tanggal 23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2002 tentang perusahaan Pembiayaan.
4. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Selain landasan yuridis dari hukum positif di atas, berikut di antara syariat dan kebolehan *hiwalah* (anjak piutang) berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw Bersabda:

Artinya: *“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikuti (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah.”*

Selanjutnya, Imam Ahmad:

Artinya: *“seseorang yang utangnya dipindahkan kepada orang kaya, hendaklah ia menerimanya”*

Atas dasar hadis di atas, seseorang yang memiliki piutang dari orang lain, kemudian orang yang berutang kepadanya memindahkan utangnya kepada orang lain, pemilik piutang dianjurkan untuk menerima pemindahan (*hawalah*) ini, tetapi tidak sampai diwajibkan. Dalam anjuran ini, dipertimbangkan agar orang yang disertai utang adalah orang yang memiliki harta untuk melunasi utang kepada *muhal* (Buku Pintar Transaksi Syariah, Dr. Musthafa Dib Al – Bugha).

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hawalah* dalam hadis di atas menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi *muhal* untuk menerima *hawalah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial. Kontrak *hawalah* dalam perbankan syariah biasanya, antara lain, diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang itu untuk selanjutnya bank menagih utang kepada pihak ketiga.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu *barter* (*Bai' al Muqayyadah*), di mana barang saling dipertukarkan. Menurut Fazlur Rahman:

“Rasulullah SAW menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahanakansistempertukaranini, lalubeliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.” Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri ([http // sunarto. staff.gunadarma.ac.id.](http://sunarto.staff.gunadarma.ac.id), diunggah tanggal 20 Mei 2014).

D. Instrumen / Produk Usaha Anjak Piutang

Menurut Heri Sudarsono (2007), dalam perbankan syariah dewasa ini dipraktikkan beberapa produk terkait dengan anjak piutang sebagai berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill Discounting*, di mana secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja dalam hal ini, nasa-

bah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

Adapun menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 tahun 2002 tentang perubahan atas perubahan Menteri Keuangan Nomor 448 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan bahwa produk dan jasa anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Anjak Piutang *Non-Financing*

Pengertian jasa anjak piutang *non-financing* berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku adalah penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang usaha klien. Jasa anjak piutang ini meliputi jasa *credit management*, sehingga klien tidak perlu menyelenggarakan pembukuan/pencatatan atas tagihannya, karena perannya tersebut sudah diambil alih oleh *factor*, dimana *factor* akan memberikan laporan secara berkala mengenai hal-hal berikut:

- a. *Bonafiditas* para customer.
- b. Laporan posisi piutang dagang klien termasuk tanggal jatuh temponya yang sangat berguna bagi klien dalam merencanakan penjualan kredit untuk periode berikutnya.
- c. *Account Statement* kepada customer. Bagi *customer statement of account* yang diterima dari *factor* membantu yang bersangkutan untuk melakukan rekonsiliasi atas pembayaran-pembayaran yang telah dilaksakannya dan untuk mengetahui posisi piutang pertanggal laporan berikut jatuh temponya.

- d. Apabila *customer* gagal membayar pada waktunya, *factor* secara aktif melakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya, tanpa merusak hubungan baik antara *customer* dan klien. Dalam *non recourse factoring*, *factor* menjamin pembayaran yang bertalian, namun hanya terbatas pada *insolvency* saja (*nondisputes*). Dalam hal terjadi perselisihan dagang antara *customer* dan klien, *factor* tidak menjamin pembayarannya, resiko *bad debt* tetap ditanggung oleh klien.

Adapun jasa yang dapat diberikan dalam anjak piutang *non-financing* ini meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- a. *Credit Investigation*

Factor sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan atas suatu tagihan, harus terlebih dahulu mengetahui secara akurat tentang *bonafiditas buyer*, *reputase* dan *main line of bussines* dari *buyer*, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan dibayarnya piutang.

- b. *Sales Ledger Administration*

Jasa yang diberikan oleh *factor* kepada klien dalam bentuk administrasi pembukuan atas penjualan yang dilakukan secara kredit, dapat mingguan, dua mingguan, bulanan atau yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan klien.

- c. *Credit control* termasuk *Collection*

Factor dapat melakukan aktivitas pembiayaan juga memantau transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan oleh *client* dengan baik, termasuk

menetapkan prosedur penagihan agar piutang yang dijamin dapat diterima pada waktunya, ini sangat diperlukan bagi transaksi dagang yang berkesinambungan.

d. *Protection against Credit Risk*

Dalam jasa ini, *factor* juga mengusahakan cara-cara untuk mengamankan resiko tidak tertagihnya suatu piutang yang telah dibiayai oleh *factor*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan jasa anjak piutang *non-financing* ini, *factor* berperan sebagai *credit department* dari perusahaan kliennya. *Client* tidak perlu mempunyai *credit department* sendiri dalam organisasi perusahaannya, karena fungsi *credit departement* telah diambil oleh *factor*.

Perkembangan jasa anjak piutang *non-financing* di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik dibandingkan dengan kegiatan anjak piutang *financing*. Terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan kurang berkembangnya usaha anjak piutang *non-financing*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat *mis*-informasi tentang keberadaan anjak piutang dalam masyarakat bahwa anjak piutang hanya bersifat *financing* saja.
- b. Takut rahasia penjualan perusahaan terbongkar.
- c. Kekhawatiran *client* akan dibocorkannya data-data penjualan perusahaan kepada pesaingnya.
- d. Tingkat keterbukaan *client*/perusahaan masih rendah.
- e. Memelihara hubungan baik antara customer.

2. Anjak Piutang *Financing*

Anjak piutang *financing* disebutkan sebagai kegiatan pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pengertian tersebut memberikan latar belakang bahwa aktivitas pembiayaan terjadi dalam transaksi anjak piutang. Seperti diketahui bersama, piutang dagang selalu diklasifikasikan sebagai *liquid* atau *quick asset* dalam laporan keuangan perusahaan. Sistem klarifikasi ini baru dapat dinyatakan benar apabila piutang / tagihan berlaku sampai dengan jatuh temponya, setelah lewat jatuh waktu tersebut, piutang dagang tidak dapat dikategorikan sebagai *liquid asset*, karena telah berubah menjadi *bad debts*.

Dalam transaksi pembiayaan anjak piutang dengan *factor*, *factor* dapat memberikan pre-financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai dengan 90% dari jumlah piutang dagang segera setelah penyerahan bukti transaksi dapat dilakukan atas dasar *Recourse financing*, dimana resiko *bad debts* tetap pada *client*, atau *factoring Without Recourse*, dimana perusahaan *factor* mengambil alih resiko *bad debts*. Jadi *client* dapat memutar kembali *Instant Cash* yang diperoleh dengan meningkatkan omzet penjualan dan memanfaatkan potongan harga tertentu yang diberikan oleh *supplier* dengan membeli bahan baku dan lain-lain secara tunai. Transaksi *factoring* dikaitkan dengan volume penjualan. Dengan meningkatkan penjualan, kredit limit pun dapat dinaikkan pula. Praktis tidak ada batas transaksi *factoring*, sehingga kredit limit dapat diartikan sebagai fungsi penjualan.

Dalam melakukan transaksi anjak piutang, terutama anjak piutang *financing*, tidak semua transaksi dagang dapat dibiayai oleh *factor*. *Factor* biasanya memberikan transaksi

dagang secara terbuka (*open account*) yang bersifat sederhana, berkesinambungan, dan bersifat angsung antara *client* dan *customer*, sehingga *factor* dapat melakukan hal-hal sebagai berikut atas piutang dagang yang berasal dari penjualan barang dan jasa:

- a. Pembelian piutang dagang untuk diuangkan secara seketika.
- b. Mengusahakan pembukuan dan administrasi penjualan yang berhubungan dengan piutang dagang.
- c. Menagih piutang yang dialihkan.
- d. Menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dibayarnya piutang dagang (*nonrecourse*).

E. Prinsip dan Prosedur Operasional Usaha Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*). Landasan hukum akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa fitur dan mekanisme akad wakalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan (wakil) antara lain:
 - a. Menagih piutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berutang (*muwakkal 'alaih*).

- a. Dapat memperoleh upah (*ujrah*) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang (*muwakkil*) dalam hal diperjanjikan.
 - b. Meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*with recourse*) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*without recourse*), dan
 - c. Membayar atau melunasi utang pihak yang berutang (*muwakkal 'alaih*) kepada piutang (*muwakkil*).
2. Hak dan kewajiban pengalihan piutang (*muwakkil*) antara lain:
 - a. Memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan-perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.
 - b. Membayar upah (*ujrah*) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan.
 - c. Dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil* dalam hal diperjanjikan, dan
 - d. Memberitahu kepada pihak yang berutang (*muwakkal 'alaih*) mengenai transaksi pemindahan piutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku *wakil*.
 3. Hak dan kewajiban pihak yang berutang (*muwakkal 'alaih*), antara lain:
 - a. Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalihan piutang (*muwakkil*) kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil*, dan
 - b. Membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil*.
 4. Piutang (*muwakkal bih*) yang menjadi objek *Wakalah bih*

Ujrah adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) yang dipindahkan kepada perusahaan pembiayaan selaku *wakil* harus dipastikan oleh para pihak belum jatuh tempo dan tidak dalam kategori piutang macet.
 - b. Piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah Islam, dan
 - c. Piutang pengalih piutang (*muwakkil*) harus dibuktikan dengan dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh para pihak.
5. *Wakalah bil Ujrah* antara perusahaan pembiayaan selaku *wakil*, pengalih piutang (*muwakkil*), dan pihak yang berutang (*muwakkal, alaih*) wajib ditetapkan secara tertulis dalam akad *Wakalah bil Ujrah*.
6. Dalam *Wakalah bil Ujrah* paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Identitas perusahaan pembiayaan selaku *wakil*, pengalih piutang (*muwakkil*) dan pihak yang berutang (*muwakkal' alaih*).
 - b. Nilai, jumlah, dan waktu jatuh tempo piutang (*muwakkil bih*).
 - c. Ketentuan mengenai upah (*ujrah*) (jika ada).
 - d. Ketentuan jaminan yang diperoleh perusahaan pembiayaan (*wakil*)(jika ada).
 - e. Ketentuan mengenai cara-cara pembayaran utang atau piutang oleh Perusahaan pembiayaan selaku *wakil*, pengalih piutang (*muwakkil*) dan pihak yang berutang (*muwakkal' alaih*), dan

- f. Hak dan tanggungjawab masing-masing pihak.
- 7. Dokumentasi dalam *Wakalah bil Ujrah* oleh Perusahaan pembiayaan selaku *wakil* paling kurang meliputi;
 - a. Surat persetujuan prinsip (*offering letter*).
 - b. Akad *Wakalah bil Ujrah* sebagai induk perjanjian.
 - c. Perjanjian pengikatan jaminan.
 - d. Bukti utang-piutang.
 - e. Surat permohonan realisasi *Wakalah bil Ujrah*, dan
 - f. Bukti pelunasan.

Adapun prosedur transaksi anjak piutang syariah menurut Andri Soemitra (2009) sebagai berikut:

1. *Supplier* (klien) menjual barang atau jasa kepada pembeli (*customer*). Penyerahan barang D/O yang ditandatangani pembeli. Asli D/O kembali kepada *supplier*.
2. Karena alasan *cash flow*, *supplier* atau klien kemudian me-*wakalah*-kan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli (*customer*).
3. Klien menyerahkan data tagihan, termasuk faktur-faktur atau D/O kepada perusahaan anjak piutang.
4. Kontrak persetujuan *Wakalah bil Ujrah* tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang.
5. Klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang.
6. Pada saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli (*customer*).
7. Pelunasan utang oleh pembeli.

Rangkuman (Summary)

- Anjak piutang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *factoring* adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon.
- Terdapat tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. *Pertama*, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. *Kedua*, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang). *Ketiga*, pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.
- Istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk anjak piutang adalah *Hiwalah bil Ujrah*. Prinsip *hawalah* yaitu pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
- Dalam perbankan syariah dipraktikkan beberapa produk terkait dengan anjak piutang sebagai berikut:
 1. *Factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasaah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
 2. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
 3. *Bill Discounting*, di mana secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja dalam hal ini, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan

pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 tahun 2002 tentang perubahan atas perubahan Menteri Keuangan Nomor 448 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan bahwa produk dan jasa anjak piutang yang dapat diberikan kepada klien minimal dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok yang mendasar, yaitu: Anjak Piutang *Non-Financing* dan Anjak Piutang *Financing*.

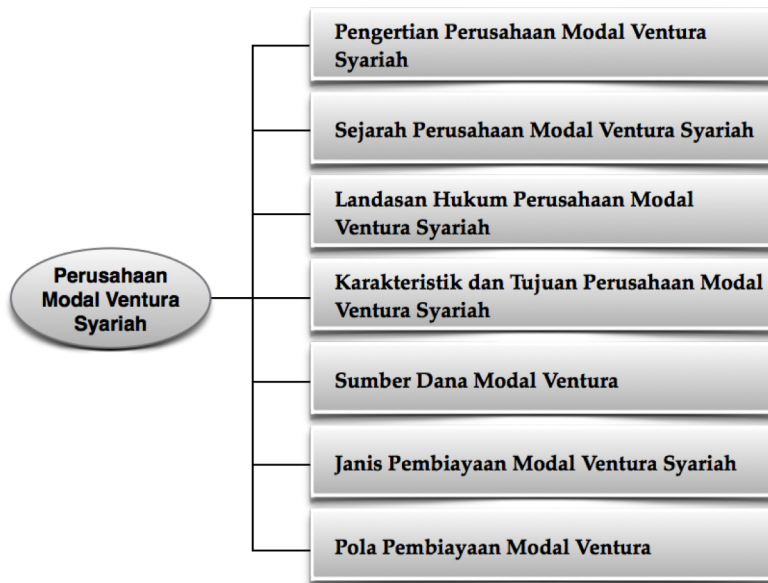
Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber. Carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Anjak Piutang terdekat.

Bab 11

Perusahaan Modal Ventura Syariah

Peta Konsep (*Concept Maps*)



Kata Kunci (*Key Words*)

Modal Ventura Syariah, PPU, *capital gain*

A. Pengertian

Kata *ventura* berasal dari bahasa Inggris *venture* yang berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko dengan tujuan memperoleh pendapatan (*return*) berupa bunga atau *dividen*. Dengan demikian, secara bahasa, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (Andri Soemitra, 2009).

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan beberapa definisi modal ventura dari berbagai sumber:

1. Tony Lorenz (Combridge, 1985) mendefinisikan: modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko di mana penyedia dana (*venture capitalist*) terutama mengharapkan *capital gain* di samping mendapat bunga dan dividen.
2. Clinton Richardson (Antario, 1987) mendefinisikan: modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi.
3. Robert White (Nasdic Institute, 1990) mendefinisikan: modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan atau non-teknologi.
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 mendefinisikan: perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Adapun modal ventura syariah adalah suatu bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Penanaman modal tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu pada perusahaan-perusahaan dan bergerak pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Sejarah Modal Ventura Syari'ah

Penyertaan modal sudah dikenal serta dilakukan oleh investor sejak zaman dahulu, Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan *American Research and Development Corporation (AR&D)*, di mana investasinya pada perusahaan *Digital Equipment Corporation* menjadi investasi terbesar yang sukses. Selanjutnya, pada tahun 1968, *Digital Equipment* melakukan penawaran sahamnya kepada publik dan memberikan imbal hasil investasi (*return on investment-ROI*) sebesar 101% kepada AR&D.

Investasi ARD's senilai \$70.000 USD pada *Digital Equipment Corporation* pada tahun 1957 tersebut telah bertambah nilainya menjadi \$355 juta USD. Modal ventura yang pertama kali adalah investasi yang dilakukan pada tahun 1959 oleh Venrock Associates pada perusahaan *Fairchild Semiconductor*. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang investasi usaha kecil (*Small Business Investment Act*) di Amerika pada tahun 1958, pada waktu itu secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha Kecil (*Small Business Administration (SBA)*) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil

untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika.

Injazat (berpusat di UEA) merupakan *venture capital* pertama yang beroperasi dengan sesuai dengan prinsip syariah. Injazat didirikan bersama-sama oleh the *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD), afiliasi dari the *Islamic Development Bank* (IDB) dengan *Gulf Finance House*, *Dubai Islamic Bank*, *Saudi Economic and Development Company* dan *Iran Foreign Investment Corporation*. Fokus pada pembiayaan *investee* pada sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi, namun hanya *investee* yang secara prinsip syariah diperbolehkan.

Khusus untuk di Indonesia, pengembangan modal ventura dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BP-UI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Pada saat itu kelembagaannya termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank, kegiatannya terutama membiayai pengembangan usaha. PT. BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 bergerak di bidang penyertaan modal. Perusahaan modal ventura syariah belakangan juga hadir, meskipun masih dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipil, dasar hukum perusahaan modal ventura menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada, di samping diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah.

Nama BPUI memang sempat menggetarkan “dunia keuangan” nusantara, ketika pada tahun 1993 salah satu anak usahanya, PT. Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh Provinsi, membentuk Perusahaan

Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di daerah untuk diberikan pembiayaan sesuai kebutuhan.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia berusaha memasyarakatkan pola penyertaan modal yang dapat membantu usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mendirikan perusahaan modal ventura. Sampai dengan akhir tahun 1998, perusahaan modal ventura berdiri di 27 Provinsi yang ada di Indonesia (di luar perusahaan modal setiap daerah tingkat II) yang ada di setiap Provinsi, semua berinduk dengan PT. Bahana Artha Ventura karena PT. Bahana Arta Ventura sebagai pemilik saham terbesar dan salah satu anak perusahaan dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 tahun 1988 bahwa perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna:

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.
5. Pengembangan projek penelitian dan rekayasa.
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Modal ventura mempunyai potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan kecil yang mempunyai prospek bagus tetapi tidak mempunyai cukup modal dan tidak memiliki akses ke perbankan dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari modal ventura. Inovasi baru dalam berbagai bidang teknologi dapat lebih mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari modal ventura sebagaimana pengalaman di berbagai Negara. Apalagi sisi perbedaan antara modal ventura konvensional dan syariah hampir tidak ada. Hal yang terpenting dalam modal ventura syariah bahwa perusahaan yang biayainya memiliki produk dan prinsip usaha yang berkesesuaian dengan prinsip syariah.

C. Landasan Hukum Modal Ventura

Ditinjau dari landasan hukumnya, modal ventura di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut:

1. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keppres No. 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. KMK No. 227/KMK.01/ 1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasang Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.

6. KMK No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.

Dasar pendirian modal ventura di Indonesia adalah Keppres Nomor 61/1998 tentang Lembaga Pembiayaan di mana usaha modal ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Ketentuan pelaksanaannya diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1989 tanggal 18 November 1989 yang merupakan penyempurnaan dari SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari perusahaan modal ventura yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994, tanggal 9 Juni 1994 diatur mengenai sektor-sektor usaha yang akan menjadi PPU.

Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995, tanggal 3 Oktober 1995, dijelaskan tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Hal yang terpenting dari peraturan tersebut bahwa modal ventura tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan, dan sejak saat itu kegiatan usaha modal ventura dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Adanya ketentuan ini menjadikan kegiatan modal ventura mulai dikembangkan di setiap provinsi yang pada prinsipnya bertu-

juan untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam rangka membantu UKM yang sulit memenuhi kredit perbankan. Di samping itu, pendirian Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) juga dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap PPU.

Khusus terkait dengan pajak bagi PMV, PP Nomor 4/1995 tentang Pajak Penghasilan PMV menegaskan bahwa penghasilan PMV yang merupakan bagian keuntungan yang diterima dari penyertaan modal kepada PPU dalam jangka waktu 10 tahun, dan keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari pengalihan penyertaan modal pada PPU dalam jangka waktu 10 tahun, bukan merupakan objek pajak penghasilan (Andri Soemitra, 2009).

D. Karakteristik dan Tujuan Modal Ventura Syariah

Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti perbankan, *leasing*, *factoring* dan pembiayaan konsumen. Dengan perbedaan karakteristik pembiayaan modal ventura tersebut menempatkan pembiayaan modal ventura syariah sebagai bentuk pembiayaan syariah yang unik.

Pembiayaan modal ventura tidak menentukan besarnya *return* yang akan diperoleh sehingga perusahaan yang dibiayai, disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), tidak memiliki suatu kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana halnya dengan bank. Keuntungan yang diharapkan terutama dalam bentuk *capital gain*. Di samping itu, jaminan bukan merupakan suatu faktor mutlak seperti transaksi kredit akan tetapi pembiayaan diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif atas kegiatan usaha PPU tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik modal ventura, maka keberhasilan perusahaan modal ventura dipengaruhi dari keberhasilan pasangan usahanya. Untuk menyakinkan keberhasilan usaha tersebut PMV turut secara aktif dalam pengelolaan usaha PPU yang dalam pembiayaan bank tidak dilakukan.

Adapun karakteristik khusus dari modal ventura syariah menurut Andri Soemitra (2009) antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Ventura Merupakan Equity (*Quasi Equity Financing*)

Bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi konversi atau *convertible bond*. Bentuk pembiayaan ini dikenal sebagai *semi equity financing*. Biasanya bentuk klasik dari jenis pembiayaan ini dengan skema *musyarakah* atau *mudharabah*.

2. Pembiayaan Modal Ventura Merupakan Investasi dengan Perspektif Jangka Panjang (*Long-term Perspective*)

Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek akan tetapi mengharapkan *capital gain* setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang.

3. Modal Ventura Merupakan Pembiayaan yang Beresiko Tinggi (*Risk Capital*)

Dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya

dengan pembiayaan perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Resiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih besar.

4. Pembiayaan Modal Ventura Bersifat Aktif (*Active Investment*)

Dikatakan pembiayaan modal ventura bersifat aktif alasannya bahwa pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan *profitabilitas*.

5. Pembiayaan Modal Ventura Bersifat Sementara

Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyerahan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara yaitu misalnya ketentuan jangka waktu penyerahan modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan Perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya perusahaan modal ventura menarik diri dengan menjual sahamnya (*divestasi*) pada perusahaan pasangan usahanya.

6. Keuntungan Berupa *Capital Gain* dan *Dividen*

Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perusahaan modal ventura terutama *capital gain* atau apresiasi nilai saham di samping *dividen*.

7. Tingkat Keuntungan (*Rate of Return*) yang Tinggi

Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi.

Disamping tujuh poin di atas, bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat beberapa karakteristik khusus sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, yaitu:

1. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.
2. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.
 - e. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.

Modal ventura merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi. Namun, bukan berarti tujuan modal ventura selamanya berdasarkan kepada keuntungan semata, akan tetapi dapat pula membantu pengembangan atau pendirian suatu perusahaan. Kasmir (1999) menginventarisir tujuan usaha modal ventura tersebut, diantaranya:

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu Perusahaan baru.
2. Membantu membiayai Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama tahap-tahap awal.
3. Membantu Perusahaan, baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
4. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
6. Mendorong pengembangan proyek *research and development*.
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu Perusahaan.

E. Sumber Dana Modal Ventura

Menurut Dahlan Siamat (2004), Kasmir (1999), dan Andri Soemitro (2009) bahwa sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

1. Investor Perseorangan

Alternatif sumber dana modal ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikutsertakan dananya ke dalam suatu usaha modal ventura tidak mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.

Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Bagi investor individu yang memiliki kesabaran dan kesiapan menerima dan menanggung risiko tinggi dalam suatu usaha merupakan seorang *venture capitalist* murni. Karena dalam usaha modal ventura sulit diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu satu atau dua tahun.

2. Investor Institusi

Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura.

3. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Lembaga keuangan nonbank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.

4. Perbankan

Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Namun perlu dipertimbangkan mengenai sifat dana bank yang jangka pendek sementara modal ventura jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek.

5. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui *two step loan* dari Pemerintah.

6. Saham

Modal ventura di Indonesia masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan saham dengan harapan memperoleh keuntungan dari *dividen*, *benefit* lain atas kepemilikan entitas tersebut, dan *capital gain* pada saat melakukan *exit* untuk sebagian atau seluruh kepemilikan melalui mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) yang dilanjutkan dengan pasar sekunder dan *private selling* ke investor potensial lainnya. Penetapan harga saham pada saat modal ventura Indonesia masuk ke dalam suatu entitas lebih banyak menggunakan nilai nominal (*par value*) saham mengingat entitas tersebut belum mempunyai harga pasar yang jelas untuk saham yang dikeluarkannya.

7. Obligasi konversi

Modal ventura masuk ke dalam entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme *exit* melalui pelunasan pinjaman.

8. Bagi hasil

Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah penerapan bagi hasil tetap atau bagi hasil minimum dari *outstanding* pembiayaan yang mengadopsi pola perbankan dengan *flat rate* atau *effective rate*-nya karena berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis *profit and loss sharing* yang memungkinkan adanya fluktuasi.

9. Pemerintah Daerah

Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD (khususnya) dari PAD) sehingga dapat memacu pembangunan di daerah. Dalam konteks ini Pemda dapat berperan sebagai PMV.

F. Jenis Pembiayaan Modal Ventura Syari'ah

Pembiayaan modal ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk penyertaan saham. Jenis pembiayaan ini merupakan kendala utama dalam operasional modal ventura dibandingkan dengan

pembiayaan kredit yang diberikan sektor perbankan. Adanya keharusan bentuk hukum PT. bagi perusahaan pasangan usaha mengakibatkan terbatasnya pangsa pasar modal ventura.

Di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan, terdapat keengganan untuk menggunakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan karena umumnya mereka tidak berminat atau tidak bersedia apabila sebagian saham perusahaan berpindah kepada pihak lain. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Keuangan memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan semua bentuk usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui modal ventura termasuk usaha kecil. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara, dan cara ini dipandang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa cara tersebut diantaranya:

1. Penyertaan Modal Langsung (*Equity Financing*)

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersangkutan. Pola pembiayaan ini dikenal dengan *equity financing* atau pembiayaan langsung. Karena pembiayaannya berupa penyertaan saham, maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil perusahaan modal ventura tersebut berasal dari saham-saham yang masih dalam portofolio, yaitu saham yang masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham

lama). Penyertaan modal dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.

Pembiayaan modal ventura yang dilakukan dengan cara mendirikan PT. bersama berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum Perjanjian dalam KUH Perdata khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak (pasal 1338) dan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320) disamping ketentuan-ketentuan mengenai pendirian suatu PT. yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Selanjutnya, semua janji yang telah disepakati, terlebih dahulu oleh para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut dengan Perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*).

b. Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU.

Penyertaan ini dilakukan oleh PMV dalam hal suatu PPU yang hendak dibiayai telah berbentuk badan hukum, dalam arti anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang (Menteri Kehakiman). Pembiayaan modal ventura dalam bentuk ini perlu diperhatikan mengenai ketentuan dalam anggaran dasar calon PPU yang bersangkutan, keputusan-keputusan rapat pemegang saham, rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.

Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham pada modal ventura syariah ini mesti mengacu pula pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 20/

DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Fatwa DSN MUI No40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Pembiayaan Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengakui saham sebagai salah satu instrument penyertaan modal di lembaga keuangan syariah.

2. Penyertaan Modal Tidak Langsung (*Semi Equity Financing*)

Pembiayaan dalam bentuk *semi equity* dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau *convertible bond* yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) maupun Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) karena sifatnya yang lebih fleksibel. Obligasi konversi lebih menarik bagi perusahaan modal ventura karena dalam periode pembiayaan tersebut perusahaan modal ventura memiliki pendapatan tetap dalam bentuk bunga sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik, maka perusahaan modal ventura akan menggunakan hak konversinya (*call option*). Penyertaan modal tidak langsung melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI no. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi syariah *Mudharabah* Konversi.

3. Pembiayaan Bagi Hasil

Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan

langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili PPU, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil. Jenis pembiayaan yang sebagian besar diserap oleh UMKM adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil. Karena pola ini secara tradisional sering kali digunakan UMKM untuk pengembangan usahanya. Di mana jenis pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) ini adalah jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah. Pembiayaan pada jenis ini dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* atau *mudharabah* (Andri Soemitra, 2009).

G. Pola Pembiayaan Modal Ventura

Pola pembiayaan pada modal ventura dapat diketahui dengan memahami karakteristik yang khas dari konsep modal ventura itu sendiri, berdasarkan uraian sebelumnya bahwa inti dari konsep perusahaan modal ventura syariah diantaranya sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura.
2. Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang di-

- peroleh kegiatan usaha yang dibiayai.
3. Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.
 4. Mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
 5. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
 6. Langkah penyelesaian apabila terjadi wan-prestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui: upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa pola pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura sebagaimana ditegaskan oleh Andri Soemitra (2009) diantaranya sebagai berikut:

1. **Pembiayaan langsung**, yaitu PMV membiayai langsung PPU yang sudah atau akan berbentuk badan hukum. PMV pun dapat berperan aktif dengan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris dalam perusahaan tersebut. Pola pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendirikan perusahaan baru dengan pemegang saham PMV dan penemu atau penggagas ide atau PMV ikut menjadi pemegang saham PPU yang sudah ada dengan mengambil porsi modal yang masih dalam portofolio dengan komposisi jumlah modal disetor ditentukan diawal kontrak.

2. **Pembiayaan langsung dengan franchise**, pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung bedanya dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh PMV atau jasa profesional dapat dialihkan kepada *franchisor*. Dalam pola ini, PMV lebih berfungsi sebagai penyedia dana atau modal kepada PPU.
3. **Inti-Plasma**, yaitu pola di mana perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Dengan cara ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma.
4. **Pola Payung**, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Masing-masing pemilik mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang dapat menjadi lebih baik. Perusahaan dengan pola ini berfungsi sebagai *trading house* bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan sehingga independensinya dapat terjaga dengan baik.
5. **Kemitraan**, pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan mitra binaan. Pola ini didahului dengan kerjasama antar perusahaan besar dengan PMV, selanjutnya PMV melakukan pembiayaan kepada PPU ataupun sebaliknya.

Rangkuman (Summary)

- Modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh pendapatann (return) berupa bunga atau dividen. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko
- Modal ventura syariah adalah suatu bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah.
- Karakteristik perusahaan modal ventura syariah menurut Fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di bidang Pasar Modal, yaitu:
 1. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.
 2. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat;

- e. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.
- Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain dari Investor Perseorangan, Investor Institusi, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan, Lembaga Keuangan Internasional, Saham, Obligasi konversi, Bagi hasil, dan Pemerintah Daerah.
- Jenis Pembiayaan Modal Ventura Syariah terdiri atas Penyertaan Modal Langsung (*Equity Financing*), Penyertaan Modal Tidak Langsung (*Semi Equity Financing*) dan Pembiayaan Bagi Hasil.

Refleksi (*Reflection*)

Apakah *learning goal* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan, bertanyalah kepada narasumber. Carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi website www.ojk.go.id atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor perusahaan modal ventura terdekat.



Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Azis. 2008. *Ekonomi Islam: Analiss Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdul Manan, Muhammad, 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- , 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, cet.1 April. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah (PT. Mizan Publika)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2004. *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*, Jakarta: PPSK Bank Indonesia

Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia

Bank Indonesia 2004. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.

-----, 2012. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Pengantar Ilmu Kebanksentralan*. Jakarta : DPSK Bank Indonesia (tidak diterbitkan)

Bimantoro, Suarpika. Syahrul Bahroem. 2003. *Organisasi Bank Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.

Bursa Efek Indonesia. *Panduan Go Public*. Jakarta: IDX (Indonesia Stock Exchange)

Bursa Efek Indonesia *Panduan Pemodal*. Jakarta: IDX (Indonesia Stock Exchange)

Chapra, Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. *Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Depkeu BPPS (tidak dipublikasikan)

Ekawarna dan Fachruddiansyah. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: GP Press.

Eka Putra, Dianata. 2005. *Berburu Uang di Pasar Modal*, Semarang: Efhar

Firmansyah, Herlan *et.al*. 2011 *Advanced Learning Economics 1*, Bandung : Facil Grafindo.

- et.al. 2013 *Anvenced Learning Economics 1 for Grade X High School Social Sciences Programme Based on Curriculum 2013*, Bandung: Facil Grafindo
- Firmansyah, Herlan dan Purwanta, Wiji. 2014. *Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- F.X. Sugiyono, Ascarya. 2003. *Seri Kebanksentralan: Kelembagaan Bank Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.
- Gozali, Ahmad. 2005. *Serba Serbi Kredit Syariah; Jangan ada Bunga Diantara Kita*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Hosen M. Nadrattuzaman dan Ali Hasan. 2008. *Khutbah Juma'at Ekonomi Syari'ah*, PIKES (Pasat Komunikasi Ekonomi Syari'ah).
- Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Isnawan, Gajar. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Kadir, Abdul. Widodo R, Priyo. Suryani, Guruh. 2008. *Penerapan Kebijakan Moneter dalam Kerangka Infaltion Targeting di Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman. 2009. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali.
- , 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers
- , 20120. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers

- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi*. Bandung: Rajawali Press.
- Manurung, Mandala. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta FE UI.
- Manurung, Adler Haymans. 2013. *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*. Jakarta: PT. Adler Manurung Press.
- Martono. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhamad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, 2006, *Syariah marketing*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Muhammad, Rifqi, 2010, *Akuntansi Keuangan Syari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, P3EI Press, Yogyakarta.
- Musthafa Dib Al Bugha. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.
- Nurhayati, Sri dkk, 2009, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Salemba, Jakarta.
- Pandia, Frianto dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Raharja Pratama, Manurung Mandala. 1999. *Teori Ekoomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI
- Richard A. Billas.. 1985. *Microeconomic Theory*. 2nd ed. McGraw-Hill. Singapore.
- Rivai, Veithzal dan Usman, Antoni Nizar. 2012. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rudiger Dornbush, Stanley Fischer dan Rucard Startz. 2008. *Makro ekonomi Edisi Bahasa Indonesia (Edisi ke 10)*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Rusdin. 2006. *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Robert S Pindyck dan Daniel L Rubinfeld. 2003. *Mikro Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Sadono Sukirno. 2000. *Mikroekonomi*. Kuala Lumpur: Aneka Publisher.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus; *"Economics"*; Mc.Graw-Hill, Int. Ed., 13th ed., 1989.
- Saladin, Djaslim, 2000, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Linda Karya, Bandung.
- Santoso, Budi. Totok, Triandanu, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Silvanita Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Singleton, John. 2009. *Central Banking in the Twentieth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Sihabuddin. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Grafindo.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum, 1996, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suherman, Rasyid. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Susilo Sri, et al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-l lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Solahudin, M, 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Solikin, Warjiyo Perry, 2004. *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta : PPSK Bank Indonesia.
- Syakir Sula, Muhammad, 2004. *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, Jakarta: Gema Insani
- Tri Subari, Sri Mulyati, at.all. 2003. *Seri Kebanksentralan: Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2005. *Buku Saku Perbankan Syariah*.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank
Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Warjiyo, Perry. 2004. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di
Indonesia*, Jakarta : PPSK Bank Indonesia.

Undang-Undang (UU):

Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud)**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
(SKL)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan
Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum SMA/MA.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No. 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan
Buku Panduan Guru Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI):**

1. Peraturan Bank Indonesia No.6 /14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, Penarikan dan Pemusnahan Uang Rupiah.
2. Peraturan Dewan Gubernur No.6/7PDG/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Manajemen Pengedaran Uang.
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perum Pegadaian.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Usaha Pembiayaan.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

7. Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
8. Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
9. Surat Edaran Intern No.7/84/INTERN tanggal 28Oktober 2005 tentang petunjuk Pelaksana Pengeluaran Uang Rupiah Baru
10. Surat Edaran Warkat Bank Indonesia No. 8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Kliring Nasional.
11. Surat Edaran Intern No.15/23/DASP/27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Giro.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Murabahah*.
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Salam

6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.
7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
10. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Wakalah*.
11. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Kafalah*.
12. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Hawalah*.
13. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang *Al-Qardh*.
14. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang *Rahn*.
16. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.
17. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 67/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah.

Internet:

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

www.bps.go.id

www.idx.co.id

www.kemenkeu.go.id

www.bisnisemas.com/bisnis-emas-di-pegadaian.htm

Web Design by Ari Agung Nugmho - ULGS Sei Panas Batam E

Mail : gsbatam@yahoo.com

Thomo Tugas Kuliah [pegadaian syariah.htm](#) posted rabu, 13
januari 2010



Glosarium (Glosary)

- Akad : Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- Asuransi : Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Anjak Piutang	: Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	: Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut, nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antara-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bank	: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bank umum	: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
BPR	: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Konvensional	: Bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada perhitungan bunga.
Bank Syariah	: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Sentral	: Sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana (rekening) dan mempergunakan

- dana tersebut untuk penyelesaian akhir (*settlement*) dari transaksi antar bank.
- Bank Indonesia : Bank sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Bank Indonesia–*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) : Sarana transaksi Bank Indonesia untuk pengadministrasian surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem BI-RTGS.
- Bunga Bank (*Bank Interest*) : Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.
- Bilyet Giro (BG) : Merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan Cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melakukan pemindah bukan ke rekening yang bersangkutan.
- Cek : Surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila Anda mempunyai rekening Giro.
- Cek Atas Nama (*Order Cheque*) : Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut.
- Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*) : Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut.

Cek Silang (<i>Cross Cheque</i>)	: Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada unjuk kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang Cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas.
Daftar Hitam (<i>Black List</i>)	: Daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi, karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank atau masyarakat.
Dana Pensiun	: Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
IKNB	: Semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat.
Modal Ventura	: Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
Pegadaian	: Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
Insako (<i>Collection</i>)	: Penagihan Cek, Wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (<i>paying bank</i>).
Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>)	: Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (<i>finance lease</i>) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (<i>operating lease</i>) untuk digunakan oleh <i>leasing</i>

	selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	: Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit (<i>Debit Card</i>)	: Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (<i>personal identification number</i>).
Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	: kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batasan kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelolaan kartu kredit.
Kliring (<i>Clearing</i>)	: Perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	: Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	: Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya) yang nomor kodanya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.

Redenominasi	: Penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.
Sistem Informasi Debitur (SID)	: Sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari lembaga pelapor.
Sistem Pembayaran	: Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	: Suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Nilai transaksi yang diproses dengan menggunakan RTGS adalah Rp.500.000.000,00 ke atas.
Transfer (<i>Remittance</i>)Jasa	: Mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.
Uang elektronik	: APMK yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
Uang giral	: Saldo rekening koran yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan.
Uang kartal	: Uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat bayar.
Unit Pelayanan Nasabah (<i>Customer Relation</i>)	: Bagian atau unit bank yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keluhan yang dihadapi nasabah. Unit ini biasanya disebut unit pelayanan nasabah atau untuk pelayanan nasabah melalui telepon disebut <i>call center</i> .

Fasilitas Dis-konto	: Pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
Giro Wajib Minimum	: Ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (<i>reserve</i>) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.
Kebijakan Moneter	: Kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.
Moral Suasion	: Himbauan moral, pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro.
Operasi Pasar Terbuka	: Kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek.
OJK	: Lembaga negara yang independent yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.
Warkat	: <i>item, document</i> yaitu instrumen perbankan, antara lain Cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai.



Tentang Penulis 1

HERLAN FIRMANSYAH



Lahir di Cianjur, 07 Juli 1981. Pendidikan formal mulai dari SD sampai SMA ditempuhnya di Cianjur. Adapun pendidikan jenjang S1 (lulus 2004) dan S2 (lulus 2008) di tempuhnya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung Program Studi Ekonomi Syariah tahun 2014 - sekarang. Setiap harinya ia bekerja dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur dan sebagai staf pengajar Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cianjur.

Selain sebagai pendidik, ia aktif di berbagai organisasi yang diantaranya menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FAI Universitas Suryakencana (UNSUR) 2013-2018, Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Jawa Barat periode 2010-2015, Sekretaris Bidang Pendidikan ICMI ORDA Cianjur 2010-2015, Sekretaris dan Direktur Program Gertas Foundation ICMI tahun 2012-2017, Ketua K-BMT Sinergi ICMI 2014-2019, Ketua

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Penulis Indonesia (API) periode 2008-2011, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Guru Penulis (AGP) – PGRI Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Bumi Siliwangi UPI Bandung periode 2003-2005. Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Pusat Jakarta Sebagai Sekretaris Umum Tahun 2005-2006, Anggota Pengawas tahun 2007 dan Ketua Pengawas 2008-2011, dan sebagainya.

Adapun buku yang pernah ditulisnya diantaranya Buku IPS untuk kelas I s.d VI SD, Penerbit Indrajaya Jakarta tahun 2008 (Lolos Penilaian PUSBUK/BSNP dan Depag Jakarta). Buku IPS untuk SMP kelas VII-IX, Penerbit Djatnika Bandung tahun 2008 (Lolos Penilaian Depag dan BSNP Jakarta). Buku *Economic 1 Advance Learning*. Untuk SMA/MA. Penerbit Grafindo, 2010. Bandung. Buku *Economic 2 Advance Learning*. Untuk SMA/MA. Penerbit Grafindo, 2010. Bandung. Buku *Economic 3 Advance Learning*. Untuk SMA/MA. Penerbit Grafindo, 2010. Bandung. Buku *Filfsafat Ilmu Pendidikan Agama*. Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung. Buku *Meretas Pendidikan Nilai*. Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung. Buku *Malapraktik Pendidikan, Demokrasi dan Birokrasi*, Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung (Penyunting). Buku *Alangkah Lucunya Sekolah Negeri Ini*, Penerbit Progressio-Sygma, 2010, Bandung. Buku Bank Umum untuk SMK tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP. Buku Pasar Modal untuk SMK tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP. Buku Koperasi Simpan Pinjam untuk SMK tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP, Buku *Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan* Tahun 2014, serta artikel-artikel pada Harian Umum Pikiran Rakyat, Republika, Koran Aspirasi, Metro Puncak, Majalah ISMA MAN Cianjur dan www.duniaguru.com. Kritik dan saran dapat ditujukan kepada email penulis: islamania_erlan@yahoo.co.id



Tentang Penulis 2

H. DADANG HUSEN SOBANA



Lahir di Cianjur, Jawa Barat, 01 September 1974. Sejak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah (alumni MIN Leuwiliang Bogor) sudah menjadi anak Yatim dan tercatat sebagai santri di Panti Asuhan Yatim Piatu *“Nurul Khoer”* Desa Sadeng Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor Jawa Barat hingga menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah-nya. Alumni MAN Pacet Cianjur (1994), Lulus dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN/d/h:IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999, Meraih gelar Magister Agama (M.Ag) dari Program Studi Ekonomi Islam (S2) tahun 2002 dari Universitas yang sama, dengan thesis berjudul *‘Dual Banking System dalam Sistem Perbankan Indonesia’*.

Saat ini, bekerja sebagai Dosen Tetap Ekonomi Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain mengajar di FSH UIN SGD Bandung, juga mengajar di Jurusan ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Suryakencana (FAI-UNSUR) Cianjur Jawa Barat

. Selanjutnya, selain sebagai dosen, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Suryakencana (FAI-UNSUR) Cianjur Jawa Barat. Disamping itu juga sebagai pengurus MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Wilayah Jawa Barat.

Diantara penelitian di bidang ekonomi Islam yang pernah dilakukan diantaranya: "Urgensi Pembentukan Amil Profesional dalam membangun kepercayaan muzaki (studi kasus pada badan amil zakat dan shodaqoh di Kabupaten Bandung), penelitian kelompok, biaya dari DIPA UIN SGD Bandung tahun 2011. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap aqad-aqad yang terjadi pada transaksi kartu kredit syari'ah". (penelitian di Bank BNI Syari'ah Bandung), Penelitian Individu dengan biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2011. "*Upah Yang Layak Menurut Yusuf Qardhawi Hubungannya Dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2013*", Penelitian Individu dengan Biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2013.

Tulisan dan artikel seputar Ekonomi Islam yang pernah dipublikasikan anatara lain: *Wakaf sebagai instrumen alternative pendapatan dan belanja negara* (2002). *"Pandangan dan Penghargaan al-Qur'an terhadap aktivitas bisnis dan kerja"* (2002). *"Prinsip dan kerangka konsep kelembagaan keuangan syari'ah"* (2003). *"Keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Bisnisman"* (2005). *"Belajarlah kita ke Negeri Cina"* (2007). *Kebijakan Fiskal dalam ekonomi Islam: dari teori ke empiris* (2009). *"Uang dalam perspektif ekonomi Islam"* (2009). *"Meneropong Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam perspektif Hukum Pidana Islam di Indonesia"* (2009). *Prosedur dan Tata Cara berwakaf dengan Uang (Wakaf Tunai) Menurut Undang Undang No. 41 Tahun 2004* (2010). *Syirkah dalam hukum ekonomi syari'ah: dari teori ke praktek* (2012). Untuk korespondensi, kritik sekaligus saran dapat dialamatkan via e-mail ke: dadanghusen_bandung@yahoo.co.id

LAMPIRAN - LAMPIRAN

